Ahmad Muttaqin

Pola Keberagamaan Masyarakat Marginal

LONTAR
MEDIATAMA


UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MARGINAL

Ahmad Muttaqin



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelangaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MARGINAL

Ahmad Muttaqin, M.Si

Editor : Arif Hidayat
Cover : M. Adil
Tata letak : Riski Diaz Kurniawan
Cetakan Pertama : Agustus 2017

Penerbit:
Lontar Mediatama
Maguwo No. 216D Banguntapan Bantul Yogyakarta
Email: lontarmediatama@yahoo.com
ISBN: 978-602-5482-90-8

Pengantar Penulis

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan karya ini. Buku yang sedang anda pegang merupakan hasil dari penelitian penulis tentang pola keberagamaan masyarakat marginal yang ada di Kampung Laut Kabupaten Cilacap.

Dari hasil penelitian ini kemudian penulis kembangkan menjadi sebuah buku yang harapannya akan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca mengenai bagaimana kondisi sosiologis, paradigm sosial dan pola keberagamaan masyarakat di Kampung Laut Kabupaten Cilacap.

Penulis mengucapkan terima aksih banyak kepada banyak pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian maupun penyelesaian penulisan buku ini, terlebih kepada istri dan anak-anakku yang menjadi motivator dalam berbagai hal.

Selamat membaca penulis sampaikan semoga, dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis

Daftar Isi

BAB 1
Pendahuluan

Secara sosiologis, agama muncul pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mengalami degradasi atau kehilangan kemampuannya. Manusia hidup dihadapkan pada kondisi alam dan lingkungan sosial yang harus dirubah agar memberi kontribusi atau minimalnya tidak memberi ancaman bagi kelangsungan kehidupan. Proses merubah alam dan lingkungan sosial ini dilakunan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat empiris dan teknis.[1]

[1] Ketidakmampuan manusia mengandalkan pengetahuan dan teknologi terjadi akibat beberapa kondisi, yaitu keyakinan akan jiwa immateri, fenomena yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat, kejadian yang

Pada saat manusia mengalami ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul keyakinan bahwa selain yang empiris terdapat sesuatu yang non empiris. Seuatu yang non empiris ini diyakini memiliki kontribusi dan memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia di bumi. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan baru manusia untuk mengetahui dan berinteraksi dengan kehidupan non empiris untuk memberikan jaminan agar kehidupan tetap berlangsung dan sejahtera. Proses mengetahui dan berkomunikasi dengan sesatu yang non empiris ini yang kemudian disebut dengan agama.[2]

Dengan pola di atas, agama merupakan bentuk universal yang dihadapi manusia di belahan bumi manapun. Artinya bahwa agama muncul dan menjadi kebutuhan baru manusia yang gejalanya bersifat dinamis dan terus berubah. Semakin suatu masyarakat dinamis dan berkembang maka kebutuhan akan sesuatu yang bersifat transendental dalam rangka mengelola hal-hal yang non empiris semakin tinggi. Persoalan yang kemudian muncul adalah formulasi dan konstruksi

sangat besar dan merusak, realitas krisis-krisis dalam hidup, sentimen kemasyarakatan, dan keyakinan akan adanya kekuatan ilahi atau wahyu. Atas kondisi-kondisi ini, masyarakat awal sejarah mencari institusi baru yang dianggap memiliki legitimasi untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 23-25.

[2] Menurut Radcliffe Brown menjelaskan bahwa agama di manapun merupaka ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar manusia, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan spiritual dan moral. Ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan. Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 34-36.

keyakinan keagamaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi terutama karenna proses pewarisan keyakinan secara turun-temurrun. Hal lain yang berpengaruh terhadap konstruksi yang berbeda tentang agama adalah pandangan sosial suatu komunitas atas lingkungan alam dan sosial yang mengitarinya.

Dengan demikian, agama sebagai sebuah keyakinan bersifat universal dan menjadi kenyataan obyektif. Sementara formulasi dan konstruksi agama bersifat subyektif, unik, dan spesifik dari para penganutnya. Sebagai kenyataan obyektif, agama dimiliki oleh masyarakat manapun yang berproeses dinamis dalam interaksi-interaksi sosial. Sebagai kenyataan subyektif, praktik keagamaan antara masyarakat satu dengan lainnya berbeda bahkan pada level satu agama sekalipun misalnya Islam dipraktikkan berbeda-beda oleh para penganutnya, begitu halnya agama lainnya. Kemunculan aliran atau mazhab dalam praktik-praktik keagamaan menjadi hal yang wajar.

Agama muncul dalam ruang sosial yang dinamis dan memiliki kelenturan atau fluiditas pada saat berinteraksi dengan unsur-unsur lain sebagai salah satu bagian dari proses sosial yang berlangsung. Bahkan pada beberapa kasus, proses fluiditas berdampak pada pemaknaan baru suatu entitas yang berinteraksi. Agama sebagai entitas yang memiliki makna khusus bisa bermakna baru yang berbeda dengan sebelumnya ketika

berinteraksi dengan kebudayaan lain.[3] Makna baru ini kemudian dijadikan sebagai konsensus dan referensi baru suatu komunitas pembentuknya dan mendorong perilaku-perilaku yang berbeda dengan *mainstream* agama sebelum mengalami fluiditas.

Usia agama yang telah berabad-abad seiring sejarah manusia di bumi menjadikannya mengalami evolusi dalam banyak tahap.[4] Ini artinya bahwa agama sebagi konstruksi tidak bersifat ajeg tetapi mengalmi dinamika seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Persoalannya kemudian adalah agama terutama yang bersumber pada ajaran-ajaran *samawi* (Islam, Nasrani, dan Yahudi) diyakini memiliki kebenaran tunggal. Keyakinan kebenaran tunggal ini kemudian mendorong sekelompok komunitas mengkonstruksi agama sebagai *mainstream.* Melalui proses-proses kajian metodologis, beberapa komunitas mengklaim pemahaman tentang agama yang diyakini sebagai yang benar sehingga harus menjadi *mainstream* bagi pemahaman kelompok lain. Dalam situasi inilah agama berubah menjadi area kontes dan perebutan klaim-klaim kebenaran.

---

[3] Fluiditas merupaan pelenturan suatu entitas budaya pada saat ia masuk pada wilayah kebudayaan lain. Pelenturan ini membuat simbol budaya awal memetamorfosis dalam makna yang baru sekaligus membuat simbol baru. Hal ini karena manusia bukanlah mekanis yang bisa mempraktikkan apa yang diterima sebagai apa adanya dan persis. Manusia akan mendesain ulang apa yang diterimanya secara sadar ataupun tanpa sadar. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 76-77.

[4] Audifax, *Semiotika Tuhan, Tafsir atas Pembacaan Manusia terhadap Tuhan,* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 66-67.

Terlepas dari perdebatan dan klaim kebenaran agama *mainstream,* secara sosiologis agama merupakan manifestasi kebutuhan manusia atas persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan secara empiris dan teknologis. Agama kemudian memberi keyakinan baru berupa spiritualitas kepada manusia dan mendasari perilaku dan tindakan-tindakan baru dalam merubah lingkungan alam dan sosial.[5] Perbedaan geografis, ekonomi, sosial, dan politik menjadikan masyarakat terklasifikasi dalam komunitas-komunitas sosial yang berbeda. Perbedaan ini sekaligus menjadi titik awal pandangan suatu komunitas terhadap segala sesuatu termasuk agama.

Kebeadaan lingkungan alam dan sosial memberi pengaruh besar terhadap konstruksi pikir komunitas atas sesuatu. Lingkungan alam dan sosial yang keras misalnya akan memberi pengaruh terhadap cara berpikir seseorang atau komunitas daerah tersebut yang lebih bercorak resisten atau atau protektif. Sementara komunitas lain yang kondisi alam dan sosialnya lebih modern akan memberi pengaruh yang cenderung *soft* dan adaptif. Pengaruh ini berdampak pada konstruksi agama sebagai

[5] Cara ertindak seseorang atau komunitas terhadap sesuatu didahului oleh proses berpikir. Cara berpikir ini kemudian melahirkan sebuah konklusi atas suatu objek. Produk berpikir inilah yang kemudian menjadi paradigma dan memberi fundamen bagi pemiliknya dalam melakukan tindakan-tindakan. Bentukan tindakan disesuaikan dengan cara berpikir paradigmatis atas sesuatu yang akan dijadikan objek. Dengan demikian, tindakan seseorang atau komunitas didasarkan ats makna yang dikandung suatu obyek dan dilakukan secara konsensus. George Ritzer, *Sosiology, A Multiple Paradigm Science,* (London: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 84-85.

kayakinan yang muncul dan menjadi keniscayaan bagi kelompok-kelompok sosial yang berinteraksi secara dinamis.

Secara stratifikatif, pandangan tentang agama antarkelas-kelas sosial berbeda. Pandangan ini sejalan dengan kepentingan sosial (*social interenst*) masing-masing kelas yang berbeda. Kelas sosial yang relatif berposisi menengah ke atas akan memiliki pandangan bahwa agama sebagai entitas yang dimiliki oleh setiap kelompok sosial merupakan aset ekonomis yang bisa dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Sebaliknya bagi kelas sosial yang berposisi menengah ke bawah, agama dianggap sebagai representasi kekuatan yang mampu mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Melalui agama, kelompok sosial ini menutupi kelemahan-kelemahan tersebut melalui tindakan-tindakan peribadatan dan ritual keagamaan lainnya.[6]

Persoalan kemudian adalah stratifikasi sosial terbentuk secara sosial. Artinya bahwa pelapisan sosial yang ada terjadi melalui proses-proses sosial yang mengarah pada praktik-praktik kekuasaan. Relasi kuasa yang timpang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial berkuasa-dominan dan kelompok-kelompok sosial marginal-tidak berdaya. Stratifikasi sosial mewakili praktik kepentingan (*interest*) yang berbeda dari masing-masing anggotanya. Kelompok dominan akan menempati

---

[6] Daniel L. Pals, *Seven Teories of Religion,* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 199-202.

posisi lapisan sosial yang paling atas, sedang kelompok sosial sub ordinat akan diposisikan pada lapiran yang rendah.[7]

Pada saat stratifikasi ini telah terbentuk, secara sosiologis akan memunculkan cara pandang unik yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok dalam memandang sesuatu. Cara pandang ini disesuaikan dengan kepentingan politik (*political interest*) yang dimiliki dan diarahkan untuk membantu komunitas mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Karena stratfikasi terbentuk secara sosial maka realitas yang terjadi pada proses pelapisan sosial adalah praktik politik. Kelompok dominan akan mendorong kelompok yang didominasi keluar dari lingkaran sosialnya dan menjadi aset bagi obyek-obyek kekuasaan dan dominasinya. Proses ini kemudian disebut dengan marginalisasi.[8] Artinya adalah kelompok dominan secara

---

[7] Stratifikasi sosial di Indonesia terbentuk dengan menggunakan 4 (empat) hal dasar, yaitu ekonomi, pengetahuan, kekuasaan, dan kehormatan. Umumnya seseorag memiliki unsur lebih dari satu dari dasar pembentuk stratifikasi tersebut. Contohnya orang yang kaya umumnya juga memiliki pengetahuan yang tinggi. Semakin tinggi kepemilikan seseorang atas salah satu atau beberapa unsur pembentuk stratifikasi maka semakin tinggi pula kelas sosial di masyarakat. Sebaliknya semakin rendah kepemilikan atas unsur pembentuk stratifikasi maka semakin rendah posisi sosialnya di masyarakat. Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal,* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 109-111.

[8] Marginalisasi merupakan proses sosial yang melibatkan beberapa orang atau kelompok dalam satu konteks tertentu. Marginalisasi dilakukan melalui penggambaran buruk seseorang atau komunitas terhadap oranga atau komunitas lain. Praktik marginalisasi menggunakan eufimisme (penghalusan makna), disfemisme (pengasaran), dan labelisasi. Eriyanto,

ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, dan kehormatan akan mendorong kelompok tertentu lainnya untuk menempati posisi sosial yang bersifat hierarkis berada di bawahnya. Dengan menempati posisi sosial di bawahnya, kelompok dominan ini memiliki klaim politik atas kelompok tersebut dan memiliki kekuasaan untuk mmengembangkan relasi-relasi kuasa yang timpang.

Sementara itu, kelompok marginal secara evolutif mengembangkan cara berpikir sendiri sebagai bagian dari upaya membangunn karakter dan identitas diri. Cara berpikir ini dikembangkan berdasar realitas marginalisasi yang diterima sehingga cenderung reaktif. Pada tahap llanjut, cara berpikir ini akan menjadi panduan (*guidence*) bagi komunitas dan anggotanya dalam bertindak dan berperilaku yang umumnya berbeda dengan *mainstream.* Agama dalam masyarakat Indomesia dijadikan sebagai panduan moral dalam bertindak dan berperilaku yang bersifat universal sehingga muncul bentuk-bentuk tertentu sebagai *mainstream.* Bagi kelompok marginal, agama dalam bentuk *mainstream* adalah bentuk dominasi tertentu sehingga mereka mengembangkan cara berpikir sendiri tentang agama yang dijadikan sebagai panduan bertindak dan berperilaku anggotanya.

Kampung Laut secara geografis berada di wilayah Kabupaten Cilacap yang berdampingan langsung dengan Pulau Nusakambangan. Kampung Laut merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kawunganten memiliki 4

Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 124-126.

(empat) desa, yaitu Ujung Gagak, Klaces, Ujung Alang, dan Panikel. Masing-masing desa terpisah oleh perairan sehingga transportasi satu desa dengan desa lainnya menggunakan kapal atau perahu.

Persoalan mendasar yang dialami masyarakat Kampung Laut saat ini adalah pendangkalan Segara Anakan akibat laju sedimentasi dari beberapa sungai terutama Citanduy dan Cimeneng. Sementara itu, Segara Anakan merupakan area tangkap ikan masyarakat Kampung Laut. Dengan semakin dangkalnya Segara Anakan maka matapencaharian masyarakat sebagai nelayan tangkap tradisional terancam.

Secara sosial, masyarakat Kampung Laut hidup dalam pusaran konflik yang melibatkan 3 (tiga) institusi besar negara, yaitu Kehakiman sebagai lembaga yang memiliki otoritas Pulau Nusakambangan, Perhutani sebagai pengelola hutan sekitar Nusakambangan, dan Pemerintah Daerah sebagai penguasa wilayah.[9] Konflik yang melibatkan lembaga-lembaga tersebut sudah

---

[9] Pendangkalan Segara Anakan membuat masyarakat Kampung Laut mencari alternatif matapencaharian baru sebagai antisipasi hilangnya are atangkap. Salah satu bentuk alternatif itu adalah mengelola tanah timbul hasil sedimentasi sungai Citanduy dan Cimeneng. Persoalannya adalah tanah timbul tersebut disengketakan oleh tiga lembaga negara. Nusakambangan mengklaim tanah timbul menjadi bagian tak terpisahkan dari Nusakambangan, sementara Perhutani mengklaim tanah timbul sebagai area tanam perhutani, begitu halnya Pemda yang mengklaim sebagai wilayah ototritasnya. Masyarakat mengelola tanah timbul semata-mata subsistensi ekonomi namun kemudian dilabeli sebagai perambah liar, penyerobot tanah, dan perusak ekosistem. Ahmad Muttaqin, *Alih Profesi Masyarakat Kampung Laut,* makalah disampaikan pada Jambore Nasional Forum Warga di Makassar tahun 2008.

berlangsung lama dan hingga kini belum ada penyelesaian sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampaknya.

Keberadaan masyarakat Kampung Laut dalam pusaran konflik diposisikan sebagai kelompok yang salah, illegal, dan liar membentuk karakteristik baru sebagai reaksi atas proses marginalisasi. Proses yang berlangsung lama kemudian membentuk pandangan umum masyarakat Kampung Laut tentang kediriannya sebagai kelompok yang didominasi, dikuasasi, dan ditindas. Situasi inilah yang mendorong secara kolektif untuk menolak proses sosial yang ada melalaui pembentukan perilaku dan tindakan-tindakan yang anti *mainstream.*

Perilaku dan tindkan ini diambil karena masyarakat Kampung Laut yang dimarginalisasi secara sosial, ekonomi, dan budaya menganggap bahwa segala bentuk yang bersifat *mainstream* adalah manifestasi kekuasaan dominatif. Oleh karena itu, sebagai bentuk penolakan masyarakat kemudian melakukan perilaku dan tindakan yang berbeda dengan arus besar sebagai seuatu yang unik, bersifat lokal, dan parsial. Termasuk dalam konteks ini adalah agama.

Sebagai entitas universal, keberadaan agama secara substantif tidak bisa ditolak oleh masyarakat Kampung Laut. Namun secara sosial politik, konstruksi agama sebagai *mainstream* ditolak. Masyarakat memiliki konstruksi sendiri tentang agama yang didasarkan atas kondisi lingkungan alam dan sosial yang secara umum

memposisikan mereka sebagai kelompok marginal. Dalam konteks inilah buku ini dirancang untuk menemukan pandangan-pandangan keagamaan masyarakat Kampung Laut. Pandangan keagamaan ini yang berfungsi sebagai panduan masyarakat bertindak dan berperilaku secara sosial.

BAB 2
Kondisi Sosiologi Masyarakat Kampung Laut

A. Sejarah Kependudukan Kampung Laut

Kampung Laut adalah sebutan untuk seluruh pemukiman yang berada di Segara Anakan, yaitu kawasan perairan yang terletak di antara daratan Cilacap sebelah Barat dengan Pulau Nusakambangan. Menurut cerita rakyat yang sampai sekarang masih dipercaya kebenarannya oleh masyarakat setempat. Penduduk asli Kampung Laut adalah anak keturunan dari para prajurit Mataram. Para prajurit Mataram pada waktu itu datang ke

daerah Kampung Laut untuk mengamankan daerah perairan Segara Anakan dari gangguan bajak laut orang Portugis. Para prajurit itu dipimpin oleh empat orang wiratamtama, yaitu yang bernama Jaga Playa, Jaga Praya, Jaga Resmi dan Jaga Laut. Berkat kesaktian dari para wiratamtama itu maka perairan Cilacap dan Segara Anakan akhirnya aman, bebas dari gangguan bajak laut.

Setelah keadaan aman, ternyata para wiratamtama dan anak buahnya itu tidak mau kembali ke pusat kerajaan Mataram, melainkan tetap tinggal di kawasan Cilacap dan sekitarnya misalnya Jaga Playa dan Jaga Praya kemudian bermukim di daerah yang sekarang disebut Klapalima, sementara itu Jaga Resmi dan Jaga Laut memilih tinggal di Pulau Nusakambangan. Jaga Resmi bermukim di daerah yang kini disebut Legok Pari, sedangkan Jaga Laut bertempat tinggal di Gebang Kuning atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kembang Kuning.

Ketika supremasi Kerajaan Mataram makin melemah dan akhirnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, banyak daerah yang tadinya merupakan daerah kekuasaan Mataram, beralih menjadi kekuasaan Hindia Belanda. Demikian Cilacap dan Nusakambangan waktu itu juga di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dipilih untuk pembuangan orang-orang yang dianggap melanggar hukum dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Para narapidana yang ada di Nusakambangan waktu itu belum diurus dengan baik oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengganggu penghuni-penghuni Pulau Nusakambangan sebelumnya, yaitu anak-anak keturunan Jaga resmi dan Jaga Laut dan anak buahnya. Karena itu mereka lalu menyingkir dari Pulau Nusakambangan, dan membuat rumah-rumah tempat tinggal mereka di laut Segara Anakan. Di Segara Anakan ini kemudian berdiri kelompok-kelompok pemukiman yang berupa kumpulan rumah tinggal, rumah tinggal yang berujud rumah panggung. Sejalan dengan perkembangan jaman, masing-masing kelompok perumahan itu makin berkembang, sehingga akhirnya membentuk sesuatu kampung. Kampung-kampung seperti itu tersebar di kawasan Segara Anakan.

Karena kampung-kampung itu berada di perairan laut (Segara Anakan), maka kemudian disebut Kampung Laut. Nama lain dari Kampung Laut adalah Bejagan atau Pejagan. Nama ini juga terkait dengan cerita diatas, bahwa Segara Anakan adalah tempat para prajurit kerajaan Mataram melakukan penjagaan agar daerah ini aman, bebas dari gangguan para bajak laut.[10]

Pada masa kemerdekaan, beberapa perkampungan yang saling berdekatan bergabung menjadi suatu kelurahan atau desa. Secara administratif Kampung Laut

---

[10] Bejagan adalah nama yang di ambil dari kata bajak laut oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama bajag laut. Masyarakat bejagan berasal dari keturunan Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo yang hidup damai bersama bajak laut.

sekarang terbagi menjadi tiga wilayah desa, yaitu Ujungalang, yang terletak di Selatan, Ujunggagak atau Karanganyar disebelah barat dan Panikel yang berada di Sebelah Utara.

Hingga tahun 1970 an sampai awal tahun 1980 an rumah-rumah tempat tinggal di Kampung Laut masih berupa rumah panggung. Rumah-rumah itu wujudnya seperti rumah-rumah Jawa pada umumnya, yaitu berbentuk segi empat dengan atap model Kampung Srotong atau Limasan, dibangun di atas tiang-tiang kayu tancang. Tinggi tiang-tiang penopang ini berkisar antara 4 hingga 7 meter, yang ditancapkan ke dasar laut pada waktu air surut. Kerangka rumah umumnya terbuat dari kayu tancang, yang waktu itu mudah didapat di hutan-hutan bakau.

Ada juga yang menggunakan balok atau papan kayu laban atau jenis kayu yang lain yang dapat diperoleh dari Nusakambangan. Lantai dan kerangka atap (kaso dan reng) umumnya juga dari kayu tancang, yang berukuran kecil dan lurus-lurus. Dinding rumah cukup bervariasi. Ada yang terbuat dari papan kayu atau gebyok, ada yang terbuat dari bamboo yang dianyam, atau ada pula yang berupa welit atau kajang, yaitu anyaman daun nipah. Atap umumnya berupa welit daun nipah atau seng. Atap genteng tidak disukai karena berat. Pola letak perumahan umumnya berderet memanjang. Bila ada dua deret, maka rumah-rumah yang ada di deret yang satu, akan dibangun menghadap pada deret yang lain, dan diantara dua deret rumah itu ada jalur jalan seperti jembatan, yang juga

terbuat dari kayu. Suatu kampung dapat terdiri dari 4 deret rumah atau lebih.

Menjelang tahun 1980-an rumah-rumah panggung seperti tersebut di atas makin menghilang. Penyebabnya, kecuali orang makin sulit mendapatkan kayu tancang atau kayu-kayu jenis lain yang dipandang baik untuk bangunan rumah, juga makin cepatnya laju pendangkalan laut sebagai akibat dari sedimentasi Lumpur yang setiap saat ditumpukkan oleh sunga-sungai yang ada di sebelah Utara Segara Anakan. Menghadapi situasi yang demikian itu, ada orang yang tidak mengganti tiang-tiang penopang rumahnya yang rusak dengan kayu, melainkan meguruk kolong rumah panggungnya dengan tanah yang diambil dari Nusakambangan atau memanfaatkan tanah timbul.

Sedikit demi sedikit, kolong rumah yang tadinya berupa ruangan yang berair, makin terisi dengan tanah. Akhirnya seluruh kolong rumah terisi dengan tanah. Keberhasilan menguruk kolong-kolong rumah itu kemudian ditiru oleh seluruh warga kampung. Bahkan kolong-kolong jembatan yang untuk jalan, secara gotong royong juga diurug, sehingga akhirnya seluruh areal tempat pemukiman itu menjadi daratan. Dewasa ini sudah sulit untuk mendapatkan rumah panggung yang berdiri di atas air laut.[11]

---

[11] Pada versi lain, berubahnya Kampung Laut menjadi daratan dimulai tahun 1982 tepatnya setelah gunung galunggung meletus. Bejagan menjadi daratan sehingga tumbuh pohon-pohon besar yang di namakan hutan timbul. Kemudian masyarakat bejagan mulai membuka hutan tersebut dan mencoba menanami pohon padi. Akhirnya masyarakat yang dulunya

Bentuk atau model bangunan rumahpun banyak yang berubah, berganti dengan bentuk atau model rumah-rumah modern sebagaimana yang terdapat di kota-kota. Bahan-bahan bangunan rumah tidak lagi didominasi oleh bahan kayu. Bahan kayu umumnya hanya untuk kerangka atap dan kusen-kusen. Lantai yang dulu kayu sekarang telah diganti dengan semen atau keramik. Demikian pula dindingnya. Atap yang dulu berupa seng atau welit, sekarang umumnya berupa genteng dari tanah liat.

Walaupun dalam bentuk dan bahan bangunan rumah telah banyak mengalami perubahan, tetapi dalam pola tata letak perumahan, terutama di pemukiman-pemukiman yang penghuninya yang bermata pencaharian sebagai nelayan, masih banyak yang mengikuti pola lama. Seperti telah disebutkan diatas, pola tata letak perumahan model lama adalah pola berderet. Dalam satu deret rumah-rumah menghadap kea rah yang sama. Dihadapan rumah-rumah itu ada jalan umum. Jalan ini juga akan menajdi patokan untuk menghadapkan rumah-rumah yang berada di deret di hadapannya, sehingga terbentuk pola tata letak perumahan dua deret dimana tengahnya terbentang jalur jalan umum.

Untuk kepentingan kemudahan tranportasi air, di belakang rumah-rumah yang berderet itu dibuat saluran air atau parit yang menghubungkan pemukiman itu ke

100 % nelayan sekarang berallih menjadi petani 60 %. Pada saat itu bejagan sudah masuk wilayah Cilacap Selatan. Pada tahun1983-1999, bejagan berpindah masuk wilayah Kecamatan Kawunganten dan tahun 2000 menjadi kecamatan sendiri yang diberi nama Kampung Laut.

laut. Dermaga-dermaga kecil terletak dibelakang rumah-rumah tinggal. Jadi kalau jalan darat berada di antara dua deret rumah yang saling membelakang.[12]

B. Letak dan Kondisi Geografis Kampung Laut

Secara geografis posisi Kampung Laut atau Segara Anakan berada di sebelah Barat Kota Cilacap. Kampung Laut dicapai menggunakan perahu motor atau kapal tradisional yang menjadi angkutan umum warga.[13] Untuk sampai di desa terdekat, yaitu Ujungalang, memakan waktu sekitar satu hingga dua jam.

Segara Anakan itu sendiri adalah suatu laguna yang dalam hubungannya dengan Samudera Hindia dipisahkan oleh pulau Nusakambangan. Akibat dari adanya Pulau Nusakambangan itu maka keganasan ombak Samudera Hindia menjadi terhalang, sehingga keadaan perairan di

---

[12] Dalam bahasa jawa disebut "ungkur-ungkuran". Rumah menghadap ke Segara Anakan yang menjadi jalur transportasi utama. Setiap rumah memilki alat transportasi (perahu) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti ke ladang, mencari ika, mengambil air minum, dan kepentingan mobilitas lainnya. Halaman rumah sekaligus sebagai tambatan perahu masing-masing keluarga.

[13] Kapal tradisional yang menjadi transportasi umum masyarakat Kampung Laut disebut dengan kapal Compreng. Kapal ini sesungguhnya awalnya digunakan warga untuk melaut di area sekitar Segara Anakan. Seiring dengan kebutuhan transprtasi warga, kapal dimodifikasi sedemikian rupa dan ukurannya diperbesar hingga bisa mengangkut 15-20 orang dengan kapasitas mesin 20-40 PK. Hingga saat ini, kapal compreng menjadi andalan warga Kampung Laut untuk mobilitas terutama menuju Cilacap dan Kalipucang untuk keperluan pemenuhan kebutuhan logistik warga. Kebutuhan logistik warga Kampung Laut didistribusi dari Cilacap yang satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan adalah kapal Compreng.

Segara Anakan relatif tenang. Air laut Samudera Hindia masuk ke laguna ini melalui plawangan atau pintu selat Nusakambangan baik yang ada di ujung Timur maupun di ujung Barat. Di Segara Anakan, air laut Samudera Hindia itu bertemu dengan air tawar dari sungai-sungai yang mengalir dari daratan tinggi disebelah Utara, misalnya sungai Citandui, sungai Cibeureum, sungai Cikonde, sungai Cemeneng, dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut selain memasok air tawar juga mengirim lumpur-lumpur hasil erosi tanah daratan ke Segara Anakan. Akibatnya, Segara Anakan makin hari makin bertambah dangkal. Di sana-sini kemudian muncul tanah timbul atau *mud island*. Di tanah timbul itu kemudian tumbuh tumbuhan dari jenis-jenis Mangrove.

Sebelum tahun 1970-an, masyarakat desa Panikel yang berada di ujung Utara dapat melihat secara jelas hutan di pulau Nusakambangan. Dari desa Panikel juga dapat melihat desa-desa lain seperti Muara Dua, Karanganyar, Majingklak, dan lain-lain. Tetapi sekarang tidak lagi dapat dilihat, karena pemandangan telah terhalang oleh hutan-hutan mangrove yang tumbuh di areal-arela tanah timbul.

Tanah timbul adalah daratan baru yang terbentuk karena tingginya laju sedimentasi di Segara Anakan. Setiap saat, lebih-lebih pada musim penghujan, sungai-sungai yang bermuara di Segara Anakan selalu mengangkut Lumpur dari hasil erosi di daratan di sebelah Utara. Akibatnya, perairan Segara Anakan makin dangkal dan

beberapa tempat dangkalan ini berubah menjadi daratan. Disinilah kemudian timbul hutan-hutan Mangrove.

Hutan Mangrove di Segara Anakan tergolong mempunyai diversitas vegetasi yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM tahun 2001 – 2002, menunjukan bahwa di suatu kawasan hutan Mangrove di Segara Anakan, dapat ditemukan sekitar 30 spesies tumbuhan. Beberapa tumbuhan yang terdapat di hutan Mangrove di wilayah ini antara lain adal api-api (jenis avicenia yaitu: *Avicenia Alba, Avecinia Marina, dan Avecenia Oficenalis), Bogem (Sconneratia Alba), bakau (ada dua macam yaitu Rizophora, Mucronata dan Rozophora Apiculata), tancang (Bruguirea sp), Nyirih (Xylocarpus Granatum), Nyuruh (Carberaodolam), nipah (Nypa Fructicans)* dan lain-lain. Disamping itu juga masih termasuk tumbuh-tumbuhan Mangrove adalah jenis-jenis perdu seperti *jrajon (Acanthus Ilicifolius), jrujon lanang* (Acanthus Sp), krakas (*Scripus Aurium*), prepatan (*Scripus Grossus*), gadelan (*Derris Heterophylla*), wlingi (*Fimbristttylis Feruginea*) dan lain-lain.[14]

Sebagai ekosistem pasang surut, ekosistem hutan Mangrove akan didominasi air laut ketika air pasang, dan ketika air surut yang dominant adalah air tawar. Dengan

[14] Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM Yogyakarta, *Keanekaragaman Hayati Segara Anakan*, Laporan Penelitian tahun 2001-2001.

demikian, komoditas hutan Mangrove mempunyai toleransi yang lebar terhadap perubahan salinitas.

Hutan Mangrove di Segara Anakan merupakan habitat dari berbagai satwa liar seperti monyet, lingsang, dan berbagai jenis burung seperti bangau, kunthul, cikakak, dan supiturang. Sementara itu, perairan yang ada dibawah hutan Mangrove dapat dikatakan merupakan ekosistem yang kaya akan berbagai jenis plangton dan komonitas benthik. Jenis-jenis pohon tertentu di hutan Mnagrove (misalnya pohon bakau) dengan bentuk akarnya yang khas dapat berfungsi sebagai rumpon yang merupakan tempat yang cocok untuk pemijahan satwa liar. Oleh sebab itulah oleh para ahli biologi perairan Segara Anakan dapat dikatakan sebagai daerah asuhan (*nursery ground*) misalnya untuk berbagai jenis ikan, udang dan kepiting.

Segara Anakan yang mempunyai dua plawangan (pintu) yaitu plawawangan timur dan plawangan barat di kedua ujung Pulau Nusakambangan, membuat kawasan ini mempunyai hubungan perairan yang langsung dengan Samudera Hindia. Saat kedalaman perairan Segara Anakan dan plawangan-plawangannya masih cukup dalam, ikan-ikan pengembara (*migratory species*) dari berbagai lautan, banyak yang singgah di Segara Anakan. Mereka bersama-sama ikan-ikan lokal yang lain dapat memperoleh makanan di Segara Anakan.

C. Kondisi Sosial Masyarakat Kampung Laut

Secara statistik, penduduk Kampung Laut mengalami pertumbuhan dalam 10 tahun terkhir. Lonjakan yang cukup signifikan ini terutama terjadi karena secara geografis Kampung Laut mengalami perubahan fisik dari yang sebelumnya 70% perairan dan 30% daratan saat ini berubah menjadi ± 50% perairan dan 50% daratan. Perubahan kondisi fisik ini kemudian mengembangkan moda ekonomi berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan, perladangan, dan budidaya ikan tambak.

Munculnya potensi-potensi baru ekonomi di Kampung Laut sedikit banyak menarik warga yang sebelumnya bermatapencahariaann di luar wilayah sebagai buruh dan pekerja lainnya. Melalui proses ini, pertumbuhan penduduk Kampung Laut terlihat mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, perubahan fisik ini kemudian dibarengi dengan pertumbuhan infrastruktur-insfrastruktur publik lainnya seperti sekolah dan puskesmas.[15]

[15] Hingga tahun 2005, infrastruktur pendidikan di Kampung Laut hanya tersedia Sekolah Dasar (SD). Pasca SD, bagi yang akan melanjutkan pendidikan harus keluar Kampung Laut yang secara tidak langsung meningkatkan angka pindah wilayah. Hal ini karena usia SMP relatif masih memerlukan dampingan langsung dari orang tua sehingga saat mereka bermigrasi ke luar Kampung Laut, orang tua dan beberapa anggota keluarga lainnya mengikutinya. Tahun 2007, infrastruktur pendidikan setingkat SMP mulai dirintis operasionalnya di Kampung Laut.

Data kependudukan dan ketersediaan tenaga pelayanan publik dasar di Kampung Laut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Kampung Laut

Jumlah Penduduk		Total
Laki-Laki	Perempuan	
8.773	8.288	17.062

Data BPS Kab. Cilacap tahun 2012

Jumlah penduduk tahun 2012 di atas berdasar data BPS tahun 2010 meningkat signifikan dibanding dengan tahun 2008 yang baru mencapai angka 11.000. populasi yang bertambah ini megindikasikan tingkat hunian Kampung Laut meningkat yang salah satunya disebabkan oleh adanya potensi-potensi ekonomi baru berbasis lahan-lahan pertanian, perkebunan dan perikanan. Peningkatan populasi ini juga ditandai oleh bangunan-bangunan rumah baru di tanah-tanah timbul dampak sedimentasi.[16]

Pertumbuhan populasi ini kemudian dibarengi dengan pertumbuhan infrastruktur pelayanan publik.

[16] Sebelum tahun 2008, umumnya rumah tangga baru dari tidak memiliki orientasi untuk menetap di Kampung Laut. Mereka cenderung bermigrasi ke daratan dan mencarai matapencahariaan di luar basis tradisionalnya. Proses migrasi ke daratan atau kota ini menjadi tahap awal bagi pemisahan diri secara fisik dan psikologis warga Kampung Laut dengan kampung halamannya. Dengan demikian, rumah tangga baru yang produktif relatif sulit ditemukan di Kampung Laut. Dalam bahasa lain, penghuni Kampung Laut terdiri dari anak-anak kecil dan tua yang produktivitasnya telah menurun. Wawancara dengan Kustoro tanggal 5 Mei 2014.

Perbandingan ketersediaan pelayanan publik dasar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2
Data Pertumbuhan Infrastruktur
Fasilitas Publik

No	Infrastruktur / Ketersediaan Pelayanan Publik	Tahun		
		2006	2009	2012
1	Sekolah Dasar	1	3	8
2	SMP	-	1	2
3	SMA	-	-	-
4	Murid	110	718	1.820
5	Guru	22	42	94

Data BPS Kab. Cilacap tahun 2012

Perkembangan infrastruktur layanan publik dasar berdasar data di atas menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perubahan ini erjadi sesuai dengan perkembangan populatif penduduk setempat. Artinya infrastruktur yang ada disesuaikan dengan tingkat kebutuhan warga. Semakin besar tingkat kebutuhan warga atas layanan publik, infrastruktur dan instrumen-instrumen pemenuhannya semakin tinggi.

Ketersediaan infrastruktur yang meningkat secara tidak langsung meningkatkan kapasitas penduduk Kampung Laut baik dari sisi sosial, politik, dan kebudayaannya. Proses akselerasi peningkatan kapasitas ini semakin nyata saat listrik pada bulan Agustus tahun 2013 resmi beroperasi. Warga secara otomatis

menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sosial politiknya dengan mengkonsumsi barang-barang tertentu sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial.[17]

Perubahan sosial warga Kampung Laut secara gradasi bisa dilihat pasca masuknya beberapa infrastruktur terutama listrik. Warga terkoneksi dengan kehidupan masyarakat umum melalui media televisi dan sebagian internet. Namun demikian, sebagai warga yang secara geografis berada di pinggiran dan jauh dari pusat kekuasaan politik, karakteristik khas lokal masih tampak. Kondisi sosiologis ini terkonstruk oleh proses sosial yang secara kontinyu membentuk karakter-karakter lokal. Karakter lokal ini sesungguhnya didasarkan atas persoalan-persoalan laten yang hingga kini belum terselesaikan yaitu kependudukan dan pertanahan.

Dari sisi kependudukan, status warga Kampung Laut baru dianggap legal tahun 2010. Sebelumnya, warga Kampung Laut masih dianggap sebagai perambah hutan dan tanah illegal. Walaupun secara administratif diakui sebagai penduduk Kab. Cilacap namun mereka tidak memiliki kepemilikan atas tanah dan lahan yang mereka

---

[17] Tidak lama setelah PLN resmi beroperasi di Kampung Laut, perubahan yang paling nampak dari situasi sosial warga adalah kecenderungan membeli barang-barang elektronik. Sebelumnya, barang-barang tersebut merupakan hal yang mewah dan sulit diakses. Fasilitas listrik membuat warga merasa tidak terbatas untuk memanfaatkan barang-barang elektronik untuk kebutuhan walaupun masih pada tahap-tahap yang sederhana. Perubahan ini kemudian secara sosial merubah beberapa situasi sosial dan kebiasaan-kebiasaan tradisional. Mudahnya, warga mulai menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan kebanyakan masyarakat. Wawancara dengan Kustoro tanggal 5 Mei 2014.

tempati. Kondisi ini berdampak pada munculnya konflik-konflik vertikal dan horizontal yang terkadang sering mengganggu proses sosial yang berlangsung.

Sedang dari sisi pertanahan, secara sosiologis warga Kampung Laut menempati posisi di tengah-tengah konflik antar lembaga yang terjadi. Basis konflik ini adalah perebutan kepemilikan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap, Perhutani, dan Kehakiman atas tanah timbul sepanjang Segara Anakan. Masing-masing lembaga merasa memiliki kekuatan hukum dan politik yang paling absah untuk mengelola tanah tersebut. Sementara warga memandang tanah tersebut sebagai potensi ekonomis yang bisa diharapkan untuk proses alih profesi dari nelayan tangkap. Namun karena tanah masih dalam sengketa, warga seringkali dipersalahkan dan dilabeli sebagai perambah liar. Situasi ini yang kemudian membentuk karakter lokal masyarakat kampung laut yang keras, konfliktual, dan resisten.

Kondisi sosial warga Kampung Laut yang berada pada pusaran konflik berdampak pada cara pandang mereka terhadap lembaga-lembaga lain di luarnya. Pandangan yang umumnya bersifat prasangka (*underestimate*) ini kemudian cenderung membentuk pola berpikir warga Kampung Laut sebagai komunitas eksklusif yang menaruh curiga kepada setiap entitas sosial yang berinteraksi dengan mereka. Sebagai penilaian pendahuluan terhadap sesuatu, prasangka bisa bersifat positif maupun negatif. Namun demikian, umumnya

prasangka mengarah pada sikap-sikap negatif terhadap anggota dari suatu kelompok sosial.[18]

Pola pikir berbasis perasaan *underestimate* ini terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Konflik antar 3 (tiga) lembaga besar Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kehakiman, dan Perhutani memberi tontonan bagaimana praktik-praktik kekuasaan terkontestasi dalam proses sosial warga Kampung Laut. Konflik tersebut menjadi tontonan karena keberadaan warga Kampung Laut tidak menjadi bagian yang penting untuk dikontestasikan sebagai salah kepentingan yang harus diakomodasi. Konflik tersebut dimulai sejak perubahan fisik akibat sedimentasi Segara Anakan yang apabila dirunut dari tingkat massifitasnya terjadi awal tahun 1970-an.

Klaim kewenangan atas tanah timbul hasil sedimentasi memposisikan warga Kampung Laut sebagai pihak yang memanfaatkan dituduh sebagai perambah liar oleh 3 (tiga) lembaga yang bersengketa. Bagi Pemkab. Cilacap, segala bentuk pertanahan di wilayah ototritas pemkab yang tidak bertuan adalah milik daerah. dengan

---

[18] Prasangka saat ini dipandang sebagai sikap. Sebelumnya,prasangka didefinisikan sebagai afeksi negatif yanag didasarkan atas ketidaksukaan yang dilatarbelakangi oleh generalisasi yang keliru dan kaku. Perkembangan terakhir, prasangka merupakan kombinasi aspek kognisi, afeksi dan kecenderungan berperilaku. Dengan arti modernini, prasangka menjadi aktivitas mental dan fisik. Perilaku fisik sebelumnya didahului oleh proses berpikir. Pandangan-pandangan kognitif kemudian mendorong seseorang dan kelompok melakukan tindakan yang relatif konsisten. Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 239-241.

pendekatan ini, maka taah timbul yang muncul di perairan Segara Anakan sebagai bagian dari wilayah kabupaten Cilacap menjadi milik Pemkab. Cilacap. Segala aktivitas yang ada di atasnya harus melalui persetujuan dan ijin dari Pemkab. Dalam konteks ini, pemanfaatan oleh warga ampung Laut untuk kegiatan pertanian dan perikanan dianggap illegal.

Sementara kehakiman sebagai pemegang otoritas Pulau Nusakambangan berargumentasi bahwa segala tanah yang menempel ke pulau penjara tersebut menjadi hak mereka. Begitu halnya dengan Perhutani yang berdasarkan UU Kehutanan bahwa setiap tanah yang tidak bertuan difungsikan untuk kegiatan konservasi dan reklamasi. Untuk konteks ini, Perhutani secara hukum mendapat mandat dari negara sebagai pelaksananya.

Atas klaim-klaim kekuasaan tersebut yang hingga kini berlangsung, warga Kampung Laut berinisiatif memanfaatkan lahan timbul sebagai aktivitas ekonomi. Kepemilikan yang berada dalam sengketa berdampak pada ketidakjelasan lembaga mana yang berhak untuk memberikan ijin atas pengelolaan oleh warga. Oleh karenanya warga melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi berdasarkan atas konsensus warga yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Resiko yang kemudian ditanggung adalah labelisasi liar yang sewaktu-waktu hasil tanamnya bisa dirampas oleh 3 (tiga) lembaga yang sedang berkonflik.

Dalam situasi ini, warga kemudian terhubung dengan lembaga-lembaga yang ada secara konfliktual. Namun konflik yang terjadi berada terlokalisasi pada wilayah mempertahankan hasil-hasil budidaya atas tanah-tanah timbul, bukan pada kepemilikan. Isu yang dimunculkan oleh warga adalah perampasan hasil-hasil pertanian dan perikanan oleh lembaga-lembaga yang berkonflik.

Realitas konflik tersebut mengkonstruksi masyarakat secara sosiologis sebagai komunitas marginal yang diposisikan sebagai korban atas sengketa kepemilikan lembaga-lembaga negara. Dalam bahasa lain, warga Kampung Laut menjadi komunitas yang dipelihara sebagai alat legitimasi konflik kekuasaan antarlembaga pemerintah. Kondisi ini yang kemudian mendorong warga secara kolektif memunculkan perilaku-perilaku sosial yang cenderung deviatif dengan pola-pola politik sosial pemerintah. Penebangan kayu mangrove misalnya tidak tepat diartikan sebagai pembalakan liar tetapi sebagai respon sosial warga atas labelisasi illegal oleh lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat sengketa lahan.[19]

---

[19] Motif utama warga melakukan penebangan hutan mangrove secara massif bukan ekonomis. Lebih tepatnya adalah respon kekecewaan warga atas sikap-sikap konfliktual lembaga-lembaga pemerintah. Mereka memposisikan warga sebagai titik masuk isu-isu sengketa lahan. Padahal kalau mau ditelusuri sesungguhnya adalah perebutan potensi-potensi ekonomis dari lembaga-lembaga yang ada. Pemda, Kehakiman, dan Perhutani berkepentingan terhadap tanah timbul ini sebagai potensi ekonomis yang tinggi. Beberapa investor tertarik menggarap tanah timbul ini untuk kegiatan perikanan budidaya dan beberapa jenis tanaman pertanian. Dengan kepemilikan yang dikuasai, lembaga ini akan memperoleh

D. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kampung Laut

Secaa tradisional, kemunculan agama bagi masyarakat didasarkan atas pengalaman yang berbeda-beda. Kemunculan agama dalam konteks ini adalah otonomi keyakinan atas kehadiran kekuatan transendental yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kesadaran atas kekuatan transendental ini secara individual didasarkan atas pengalaman yang diversifikatif. Pengalaman ini terutama dikaitkan dengan tingkat keterbatasan kapasitas individual atau kelompok dalam sebuah komunitas. Bagi individu atau kelompok yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi lebih maju, kesadaran atas kehadiran kekuatan transendental lebih rumit dibanding dengan individu dan kelompok yang relatif tradisional.[20]

---

keuntungan yang besar. Sementara warga Kampung Laut relatif sebagai penonton. Inilah yang sedang kita upayakan agar hak-hak kelola lahan ada pada warga. Hak ini mungkin diperoleh apabila kita secara kolektif melakukan perlawanan. Wawancara dengan Kustoro, 5 Mei 2014.

[20] Sepanjang hidupnya, manusia mengandalkan pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin maju pula tingkat peguasaan mereka terhadap pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian maka batas cakupan teknologi dan pengetahuan atas persoalan kemanusiaan lebih luas dibanding masyarakat tradisional. Batas cakupan ini berpengaruh terhadap kesadaran kelompok menghadirkan kekuatan transendental yang secara konseptual didesain untuk mengatasi ketidakmampuan pengetahuan dan teknologi. Pada masyarakat tardisional yang kemampuan teknologi dan pengetahuannya relatif terbatas, kesadaan atas kekuatan transendental dalam wujud Tuhan lebih sederhana. Dalam bahasa lain, kelompok tradisional lebih agamis atau religius dibanding masyarakat mdern. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 24-27.

Kondisi sosiologi masyarakat Kampung Laut yang dilingkupi oleh lingkungan fisik dan sosial unik memberikan karakteristik khas yang berbeda dengan komunitas lainnya. Perbedaan ini kemudian secara alamiah membentuk karakteristik komunal yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku.[21] Dalam konteks agama, masyarakat akan terlihat dari sikap dan perilaku yang memiliki keterkaitan dengan praktik-praktik keagamaan seperti ritual dan berbagai jenis praktik peribadatan lainnya.

Dalam pola ini, keagamaan masyarakat Kampung Laut terkonstruk oleh karakteristik lingkungan fisik dan sosial yang khas. Secara fisik, perubahan kondisi dari perairan menjadi daratan secara tidak langsung berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap pola produksi (*mode of production*) atau mata pencahariaan utamanya. Perubahan pola berbasis lingkungan fisik yang berbeda menjadi persoalan tersendiri mengingat masyarakat tidak memiliki tradisi yang cukup dalam hal berbudidaya. Selain itu, lingkungan fisik yang berubah memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri terutamma terhadap karakteristik-karakteristik daratan yang tidak terlalu familiar.

---

[21] Sikap timbul karena ada stimulus. Sikap dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan. Lingkungan sosial adalah barang atau manusia yang berada di sekitarnya yang secara massif memberi pengaruh terhadap individu atau kelompok yang dilingkupinya. Lingkungan sebagai stimulus juga berpengaruh terhadap pola perubahan sikap sosial yang dimiliki. Abu Ahmadi, *Psikologi sosial,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 170-172.

Secara sosial, labelisasi masyarakat sebagai perambah liar dan perusak ekosistem berdampak cukup signifikan terhadap sikap dan perilaku yang dijadikan referensi utamanya. Terlebih situasi ini kemudian masuk dalam pusaran konflik lembaga-lembaga negara yang memposisikan masyarakat sebagai kelompok yang tertuduh. Resistensi sosial menjadi perilaku yang umum dan menjadi kesadaran kolektif masyarakat Kampung Laut terutama saat berinteraksi dengan warga di luar komunitasnya.[22]

Situasi lingkungan fisik dan sosial yang relatif memberikan tekanan kepada warga Kampung Laut berdampak pada pembentukan konsepsi diri komunitas. Dalam teori konsepsi diri, individu atau kelompok menyusun keyakinan dan atribut-atribut yang terkait dengan diri dan kelompok. Kosep diri merupakan pikiran, keyakinan, dan kesan individu atau kelompok tentang sifat dan karakteristiknya, keterbatasan dan kapabilitasnya, serta kewajiban dan aset-aset yang dimilikinya.[23] Masyarakat kampung Laut berdasar situasi lingkungan fisik dan sosial mendefinisikan diri sebagai kelompok marginal atau pinggiran yang diperlakukan secara sewenang-wenang atau tidak adil oleh pemegang otoritas, yaitu pemerintah Kabupaten Cilacap, Kehakiman melalui Lapas Nusakambangan, dan Perhutani.

---

[22] Wawancara dengan Yusmanto, aktivis lingkungan Kampung Laut pada tanggal 5 Mei 2014.

[23] Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial, Integrasi Pengetahuan wahyu dan Pengetahuan Empirik,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm.62-53.

Tindakan sewenang-wenang ini ternyata tidak bisa diurai oleh masyarakat hanya dengan mengandalkan kekuatan rasional dalam bentuk pengetahuan dan teknologi. Pada situasi inilah kemudian masyarakat cenderung mengkonstruksi nilai-nilai baru yang mengatasi empirisisme. Dari konteks inilah kemudian muncul nilai-nilai agama yang bersifat transendental.[24] Keagamaan masyarakat Kampung Laut muncul secara sosiologis dalam situasi ketertekanan lingkungan fisik dan sosial yang berdampak pada pelemahan-pelemahan sosial, politik, dan budaya masyarakat Kampung Laut. Kemunculan agama di sini bersifat kreatif karena diorientasikan untuk membantu masyarakat mengurai persoalan ketidakberdayaan masyarakat.

Melalui pola di atas, keberadaan agama bagi warga Kampung Laut diorientasikan untuk membantu mengurai persoalan-persoalan yang berdampak pada pelemahan sosial. *Pertama,* lingkungan fisik memberi ancaman bagi potensi kehilangan matapencahariaan warga sebagai nelayan tangkap tradisional. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya ototritas warga untuk mengelola lahan-lahan baru hasil sedimentasi karena disengketakan

[24] Fungsi agama secara fundamental berada pada posisi di mana masyarakat mengalami keterbatasan dan ketidakberdayaan. Kenyataan sosial masyarakat berada pada situasi ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. Situasi ini terjadi karena pengetahuan dan tenologi sebagai andalan memahami dan mengendalikan dunia kehilangan legitimasinya. Dari hal ini manusia kemudian secara kreatif mencari nilai-nilai baru yang berfungsi membantu manusia dalam tiga situasi fundamental di atas. Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 14-15.

oleh 3 (tiga) lembaga negara. Artinya, perubahan fisik tidak memberikan harapan baru bagi warga dalam meningkatkan kapasitas ekonomi produktif. Peluang yang ada justeru berdampak terhadap semakin terpinggirnya warga secara ekonomis.

Keberagamaan dalam konteks di atas terpola untuk memberi kekuatan moral spiritual bagi warga untuk memahami perubahan fisik sebagai bagian dari *sunnatullah.* Agama kemudian menjadi instrumen untuk memperkuat konsolidasi sipil mengadvokasi kepentingan-kepentingan warga beraktivitas ekonomis. Agama menjadi penggerak sosial yang agresif dalam rangka mengembangkan potensi-potensi ekonomis yang menjadi hak produktif warga. Kekuatan transendensi yang dimiliki agama dimanfaatkan sebagai sumber moral dan spiritual bagi gerakan-gerakan sosial politik warga merebut sumberdaya ekonomi.

Kedua, marginalisasi sosial akibat labelisasi buruk lembaga-lembaga yang terlibat konflik sumberdaya membutuhkan kekuatan sosial ekstra untuk mengklarifikasi dan memproduksi opini baru tentang Kampung Laut. Sebagai proses politik, marginalisasi dilakukan oleh kelompok tertentu untuk memposisikan kelompok lain sebagai pelaku-pelaku kesalahan yang dihadapkan kepada dirinya sebgai pihak yang benar. Kepentingan yang ingin dicapai adalah pengorganiasian opini publik bahwa pelaku kesalahan adalah pihak yang harus mendapat hukuman.

Praktik marginalisasi Kampung Laut menghasilkan opini publik bahwa Kampung Laut adalah kumpulan dari kelompok-kelompok perambah liar yang keberadaannya merusak ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan untuk menertibkannya adalah hukum dimana kelompok yang bersalah mendapatkan punishment dari piha-pihak yang berwenang. Melalui proses ini, lembaga-lembaga yang dianggap berwenang terkait dengan Kampung Laut adalah kehakiman, Pemkab Cilacap, dan Perhutani. Sedang warga Kampung Laut adalah kelompok yang salah dan terhukum. Keagamaan warga muncul dalam situasi sosial ini yang kemudian melahirkan citra agama yang kritis dan berorientasi politis.

Selain pola keagamaan yang muncul dari praktik politik marginalisasi dan konflik sumberdaya alam, keberadaan kampung laut secara sosiologis cukup seksi. Hal ini karena keunikan-keunikan yang dimiliki menjadikannya sebagai sumber isu-isu populis terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan, dan pembangunan daerah tertinggal.

Isu ini dalam konteks kekinian berkembang menjadi isu keagamaan karena keterlibatan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan agama tertentu. Pemanfaatan dan pembukaan hutan baru di area Nusakambangan melibatkan Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) yaag berafiliasi dengan gereja Katholik. Keterlibatannya dianggap sebagai bagian dari strategi misionarisme. Keterlibatan YSBS ini kemudian direspon

oleh kelompok-kelompok Islam fundamental dengan pendekatan purifikasi Islam.[25]

Kehadiran kelompok baru ini menjadi penambah konflik sosial yang sebelumnya telah terjadi. Konflik baru yang bernuansa agama ini secara tradisional membentuk pola bari keagamaan masyarakat Kampung Laut yang tidak terlibat baik dalam kegiatan misionarisme Katholik maupun fundamentalisme Islam.

Praktik keagamaan warga lebih diorientasikan untuk menciptakan solidaritas sosial dalam rangka mengurai persoalan-persoalan laten warga. Dengan orientasi ini, praktik-praktik ritual keagamaan tidak terlalu menjadi isu strategis dan bahkan hubungan antar agama bersifat pluralistik. Masjid atau gereja tidak menjadi simbol eksklusif bagi agama tertentu tetapi menjadi bagian dari gerakan sosial politik warga memperjuangkan hak-hak ekonomi, politik, dan sosialnya.

---

[25] Wawncara dengan Kustoro, 10 Juni 2014.

BAB 3
Identitas dalam Tindakan Sosial

Secara umum, penelitian ini menggunakan teori-teori yang berada dalam tradisi sosiologi agama. Dalam perspektif sosiologi, agama merupakan konstruksi sosial akibat proses interaksi baik dalam individu maupun antarindividu. Perilaku keagamaan seseorang atau kelompok muncul ditentukan oleh cara berpikir yang berkembang dan dijadikan konsensus secara kolektif. Dengan proses ini, agama bersifat profan dan historis. Transendensi agama muncul setelah ia berada dalam konstelasi sosial sebagai institusi yang sempurna, sakral, dan suci. Konstruksi inilah yang kemudian memposisikan agama sebagai pusat dan sumber nilai bagi perilaku dan tindakan sosial para penganutnya.

Dalam kerangka teoretis ini, beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku keagamaan masyarakat Kampung Laut adalah:

A. Paradigma Sosial

Istilah paradigma pertma kali disampaikan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Dalam bukunya, Kuhn menolak pandangan bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif. Bagi Kuhn, perkembangan pengetahuan berlangsung secara revolutif. Pada suatu waktu, pengetahuan didominasi oleh satu paradigma tertentu, yaitu pendangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu.[26]

Paradigma terdiri dari pandangan hidup (*world view* atau *weltanschaung*) yang dimiliki oleh kelompok dalam suatu keunikan tertentu.[27] Dalam konteks

[26] George Ritzer, *Sociologi, A Multiple Paradigm Science,* (London: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 1-3.

[27] Diadaptasi dari paradigma dalam ilmu pengetahuan. Setiap pengetahuan memiliki paradigma yang berbeda sehingga berdampak terhadap rumusan-rumusan metodologis yang digunakan. Dalam sosiologi misalnya, paradigma yang berkembang bersifat majemuk di mana masing-masing pardigma memiliki konteks yang berbeda. Secara umum, sosiologi memiliki 3 paradigma berbeda, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Masing-masing memiliki asumsis teoretis yang berbeda dan berpengaruh terhadap metode-metode yang digunakan. Intinya paradigma menjadi satu kesatuan berpikir yag mewakili satu pandagan tertentu tentang suatu hal. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 53-55.

komunitas sosial, paradigma mmerupaka pandangan mendasar dari anggota komunitas tentang apa yang menjadi identitas, karakteristik, watak, dan simbol-simbol lain yang menjadi bagian dari totalitasnya sebagai kelompok sosial. Paradigma membantu anggota komunitas merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan yang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan tersebut.[28]

Secara paradigmatik, kenyataan sosial terbagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu tingkat individual, tingkat antarpribadi (interpersonal), tingkat struktur sosial, dan tingkat budaya.[29] Tingkat individual terbagi dalam tingkat perilaku (*behavior*) dan tingkat sibyektif. Tingkat ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian untuk analisa utamanya.

Tingkat interpersonal meliputi interaksi antarindividu dengan semua arti yang berhubungan dengan komunikasi simbolis, penyesuaian timbal-balik, negosiasi bentuk-bentuk tindakan yang saling tergantung, kerjasama atau konflik antarpribadi, pola-pola adaptasi bersama atau yang berhubungan satu sama lainnya terhadap lingkungan yang lebih luas.

---

[28] George Ritzer, *Sociologi, A Multiple Paradigm Science,* (London: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 4.

[29] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 60-62.

Tingkat struktur sosial pusat pengamatannya adalah pola-pola tindakan dan jaringan-jaringan interaksi yang disimpulkan dari analisis terhadap keteraturan dan keseragaman yang terdapat dalam waktu dan ruang. Satuan-satuan yang paling penting dalam kenyataan sosial tingkatan ini dapat dilihat sebagai posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Tekanan ini dapat dilihat dalam bentuk struktur-struktur sosial yang kecil dan juga struktur sosial yang lebih besar seperti asosiasi-asosiasi kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat budaya meliputi arti, nilai, simbol, norma, dan pandangan hidup umumnya yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat. Dalam pengertian yang luas, istilah kebudayaan terdiri dari produk-produk tindakan dan interaksi manusia.

B. Teori Interaksionisme Simbol

Interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu.

Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) dalam West-Turner[30], interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut menetap.

Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam Ardianto,[31] makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi. Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain: (1) Pikiran (*mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain, (2) Diri (*self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori

---

[30] Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 96.

[31] Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), hlm 136.

interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the-self*) dan dunia luarnya, dan (3) Masyarakat (*society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya

”*Mind, Self and Society*” merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal.[32] Konsep ini memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,

b. Pentingnya konsep mengenai diri,

c. Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Tema pertama pada interaksi simbok berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, di mana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di

---

[32] Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 96.

konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer (1969) dalam West-Turner.[33] Asumsi-asumsi itu adalah: *pertama,* manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. *Kedua,* makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. *Ketiga,* makna dimodifikasi melalui proses interpretif.

Tema kedua pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya ”Konsep diri” atau ”*Self-Concept*”. Pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Tema ini memiliki dua asumsi tambahan, menurut LaRossan & Reitzes (1993) dalam West-Turner,[34] yaitu: Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Dan konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku.

Setiap individu mempunyai pengetahuan dan keyakinan unik mengenai dirinya sendiri. Konsep diri ini menjadi identitas yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Konsep diri bersifat *multifaceted*

---

[33] Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 99.

[34] Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 101.

yang dapat dibedakan dalam hal sentralitas dan kepentingannya, pencapaian aktual atau pencapaian potensialnya, orientasi waktunya, serta positif-negatifnya. Keempat hal tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu konsep diri yang sifatnya stabil (*core self concept*) dan komponen konsep diri yang tidak stabil (*wprking self concept*).[35]

Tema terakhir pada interaksi simbolik berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individulah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah *pertama,* orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. *Kedua*, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

C. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan

---

[35] Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial, Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 62-63.

orang lain.[36] Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.[37]

Jelasnya ada lima ciri pokok yang menurut Weber[38] termasuk sebagai tindakan sosial, yaitu: (1) jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata, (2) tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya, (3) tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun, (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan (5) tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula

---

[36] George Ritzer, *Sociologi, A Multiple Paradigm Science,* (London: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 53.

[37] SP. Turner, *The Cambridge Companion to Weber,* (New York: Cambridge University, 2000), hlm. 15.

[38] SP. Turner, *The Cambridge Companion to Weber,* (New York: Cambridge University, 2000), hlm. 75.

dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang.

Lebih detile, konsepsi tindakan sosial Max Weber adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat serta mempunyai maksud tertentu. Suatu tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain.[39]

Teori tindakan sosial terbagi dalam empat tipe diantaranya tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan yang dipikirkan. Pelaku berpikir bahwa tindakan yang dilakukan termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Contohnya, seseorang ingin membeli kendaraan bermotor. Ia harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Uang tersebut disisihkan untuk keperluan pribadi dan tabungan membeli kendaraan. Jika tabungannya sudah terkumpul atau sudah mencukupi

---

[39] David Lee dan Howard Newby, 1984. *The Problem of Sociology, (*London: Hutchinson & Co. Publisher Ltd, 1984), hlm. 177-179.

harga sebuah kendaraan bermotor, maka ia akan membeli kendaraan tersebut.

Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional karena seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh sang aktor. Jadi, tindakan tradisional berdasarkan suatu nilai yang hanya mengikuti pada tradisi yang dilakukan dan hanya berdasarkan oleh para pendahulunya saja, tidak diketahui apa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Tindakan ini bahkan tidak rasional untuk dilaksanakan. Contohnya adalah upacara adat Jawa yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kadang tujuannya bahkan tidak diketahui oleh yang melaksanakan.

Tindakan rasioanal berorientasi nilai merupakan tindakan yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai dan cara yang digunakan tidak terlalu dipentingkan. Jadi, rasional berorientasikan nilai adalah tindakan sosial yang memperhitungkan manfaatnya, tapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan tersebut dinilai baik dan benar oleh masyarakat sekitarnya. Contohnya yaitu seseorang yang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contoh lainnya yaitu seorang pemuda memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek karena ia memiliki keyakinan bahwa anak muda harus hormat kepada orang tua. Atau,

seorang berpuasa sekian hari untuk mendapatkan berkah sesuai dengan kepercayaannya.

Tindakan afektif merupakan tindakan yang biasanya dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa memperhitungkan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontan atas suatu peristiwa. Tindakan ini juga bersifat irrasional.Contohnnya adalah seseorang bekerja lebih giat untuk mendapatkan pujian dari atasannya. Tindakan ini didasarkan pada perasaan yang ingin mendapat perhatian lebih. Contoh lainnya, orang tua akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Bahkan melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan anaknya. Tindakan afektif terhadap si anak, membuat orangtua tersebut melakukan hal yang orang lain tidak bersedia lakukan.

Tindakan sosial menekankan pada orientasi subjektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai atau standar normatif bersama. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan individu serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu juga dalam memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar ada pengaturan normatifnya.[40]

---

[40] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 113.

Prinsip-prinsip dasar ini bersifat universal dan mengendalikan semua tipe perilaku manusia tanpa memandang konteks budaya tetentu. Untuk mencapai tujuan ini penting untuk membentuk suatu strategi dalam mengidentifikasi elemen-elemen dasar yang membentuk gejala dan untuk mengembangkan seperangkat kategori dan untuk membahas tipe-tipe kasus yang berbeda khususnya elemen-elemen dasar apa saja yang ada, orientasi apa yang berbeda yang dapat ditujukan dengan strategi ini., bagaimana orientasi subjektif yang terdapat pada individu berbeda, cocok satu sama lain atau menghasilkan tindakan yang saling tergantung yang membentuk suatu sistem sosial.

Untuk menjawab ini Parsons membuat sistem klasifikasi yang paling banyak dikenal atau sering dikutip adalah variabel berpola (pattern variables). Dalam konteks kerangka pilihan Parsons, variabel-variabel ini dilihat lebih umum sifatnya. Dalam kerangka umum itu orientasi orang yang bertindak terdiri dari dua (2) elemen dasar yaitu:

1. Orientasi motivasional

   Orientasi ini menunjuk pada keinginan individu yang bertindak untuk memperbesar kepuasaan dan mengurangi kekecewaan. Orientasi ini terdiri dari 3 dimensi yaitu:

   a. Dimensi Kognitif yaitu menunjuk pada pengetahuan orang bertindak mengenai situasinya khususnya dihubungkan pada kebutuhan dan

tujuan pribadi. Dimensi ini mencerminkan kemampuan dasar manusia untuk membedakan antara rangsangan-rangsangan yang berbeda dan membuat generalisasi dengan satu rangsangan dengan rangsangan lainnya.

b. Dimensi katektif atau emosional yaitu menunjuk pada reaksi katektif atau emosional dan orang yang bertindak terhadap situasi atau berbagai aspek didalamnya. Ini juga mencerminkan kebutuhan dan tujuan individu. Umumnya, orang memiliki suatu reaksi emosional positif terhadap elemen-elemen dalam lingkungan itu yang memberikan kepuasan atau dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan, dan reaksi yang negatif terhadap aspek-aspek dalam lingkungan itu yang mengecewakan.

c. Dimensi evaluatif yaitu menunjuk pada dasar pilihan sesorang antara orientasi kognitif atau katektif secara alternatif. Evaluatif ada karena individu selalu memiliki banyak kebutuhan dan tujuan. Untuk itu kemungkinan banyak individu reaksi katektif maka kriteria yang digunakan individu untuk memilih dari alternatif ini merupakan dimensi alternatif.

2. Orientasi nilai

Orientasi ini menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan

adanya kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Orientasi ini terdiri dari 3 dimensi yaitu:

a. Dimensi kognitif yaitu menunjuk pada standar-standar yang digunakan dalam menerima atau menolak berbagai interoretasi kognitif mengenai situasi.

b. Dimensi apresiatif yaitu menunjuk pada standar yang tercakup pada pengungkapan perasaan atau keterlibatan emosi atau afektif.

c. Dimensi moral yaitu menunjuk pada standar-standar abstrak yang digunakan untuk menilai tipe-tipe tindakan alternatif menurut implikasinya terhadap sistem itu secara keseluruhan baik individual maupun sosial dimana tindakan itu berakar.

Orientasi nilai keseluruhan mempengaruhi dimensi evaluatif dalam orientasi motivasional. Ketiga dimensi orientasi nilai itu mencerminkan pola-pola budaya yang diresapi individu. Dimensi-dimensi ini dapat juga digunakan untuk mengklasifikasikan aspek-aspek sistem budaya yang berbeda. Singkatnya, dimensi kognitif berhubungan dengan sistem kepercayaan budaya, dimensi apresiatif dengan sistem budaya yang berhubungan dengan simbolisme ekspresif, dan dimensi moral

berhubungan dengan sistem budaya dalam orientasi nilai.[41]

D. Teori Identitas

Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, dan direkonstruksi oleh hubungan-hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, memodifikaasinya atau bahkan membentuknya kembali. Masyarakat memiliki sejarah dan pada setiap perjalanan sejarah muncul identitas-identitas khusus. Namun demikian sejarah-sejarah itu dibuat manusia dengan identitas-identitas tertentu.[42]

Struktur-struktur sosial historis tertentu melahirkan tipe-tipe identitas yag bisa dikenali dalam kasus-kasus individual. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa seorang suku Jawa memiliki identitas yang berbeda dengan seorang suku Bugis, seorang guru

---

[41] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 113-115.

[42] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 248-249.

memiliki identitas yang berbeda dengan petani, dan seterusnya. Orientasi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari tergantung pada tipifikasi-tipifikasi seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa tipe-tipe identitas dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan pernyataan-pernyataan tentang perbedaan identitas antara satu dengan lainnya bisa diverifikasi dan disangkal dengan menggunakan akal sehat.

Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dan masyarakat. Sebaliknya, tipe-tipe identitas hanya merupakan produk-produk sosial dan unsur-unsur yang stabil dari kenyataan sosial obyektif yang ditentukan secara sosial. Dengan demikian, tipe-tipe identitas merupakan pokok dari suatu bentuk kegiatan berteori dalam tiap masyarakat meskiipun tipe-tipe tersebut stabil dan pembentukan identitas-identitas individu relatif tidak menimbulkan masalah.

Sheldon Stryker (1980) mengemukakan teori indentitas memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Dalam hal ini Stryker tampaknya setuju dengan perspektif struktural, khususnya teori peran. Namun dia juga memberi sedikit

kritik terhadap teori peran yang menurutnya terlampau tidak peka terhadap kreativitas individu.[43]

Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep diri/self (dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap peran yang ditampilkan dalam berinteraksi dengan orang lain mempunyai definisi tentang diri sendiri yang berbeda dengan diri orang lain, yang oleh Stryker dinamakan "identitas". Jika seseorang memiliki banyak peran, maka dia memiliki banyak identitas. Perilaku individu dalam suatu bentuk interaksi, dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas dirinya, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi dengan individu tersebut.

Intinya, teori interaksi simbolis dan identitas mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial. Perspektif iteraksionis tidak menyangkal adanya pengaruh struktur sosial, namun jika hanya struktur sosial saja yang dilihat untuk menjelaskan perilaku sosial, maka hal tersebut kurang memadai.

Erikson menjelaskan identitas sebagai perasaan subjektif tentang diri yang konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu.[44] Dalam berbagai tempat dan berbagai situasi sosial, seseorang masih memiliki

---

[43] Sheldon Stryker, *Symbolic Interactionism, A Structural Version,* (California: Benjamin Cummings, 1980), hlm. 71-72.

[44] Erik H. Erikson, *Identity, Youth and Crisis,* (New York: W. W. Norton Company, 1968), hlm. 63.

perasaan menjadi orang yang sama. Sehingga, orang lain yang menyadari kontinuitas karakter individu tersebut dapat merespon dengan tepat. Sehingga, identitas bagi individu dan orang lain mampu memastikan perasaan subjektif tersebut.

Identitas berarti memiliki gambaran diri yang jelas meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai, nilai, dan kepercayaan yang dipilih oleh individu tersebut. Komitmen-komitmen ini meningkat sepanjang waktu dan telah dibuat karena tujuan, nilai dan kepercayaan yang ingin dicapai dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan dan makna pada hidup.

Identitas diri merupakan komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Semakin baik struktur pemahaman diri seseorang berkembang, semakin sadar individu akan keunikan dan kemiripan dengan orang lain, serta semakin sadar akan kekuatan dan kelemahan individu dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, jika kurang berkembang maka individu semakin tergantung pada sumber-sumber eksternal untuk evaluasi diri.

Erikson membedakan dua macam identitas, yakni identitas pribadi dan identitas ego. Identitas pribadi seseorang berpangkal pada pengalaman lansung bahwa selama perjalanan waktu yang telah lewat, kendati mengalami berbagai perubahan, ia tetap tinggal sebagai pribadi yang sama. Identitas pribadi baru dapat disebut identitas Ego kalau identitas itu disertai dengan kualitas

eksistensial sebagai subyek yang otonom yang mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam batinnya sendiri serta masyarakatnya. Menurut erikson, proses pembentukan identitas berlangsung secara pelan-pelan dan pada awalnya terjadi secara tak sadar dalam inti diri individu. Proses pembentukan identitas yang berangsur-angsur itu sebenarnya sudah dimulai pada periode pertama, yakni periode kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar.

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik yang memelihara kesinambungan arti masa lampaunya sendiri bagi diri sendiri dan orang lain; kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.

Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.

Buat Fromm (1947),[45] Identitas diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Selain mahkluk individual yang membangun identitas dirinya berdasarkan konsep atau gambaran dan cita-cita diri ideal yang secara sadar dan bebas dipilih, manusia sekaligus juga mahkluk sosial yang dalam membangun identitas dirinya tidak dapat melepaskan diri dari norma yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup dan peran sosial yang diembannya dalam masyarakat tersebut.

Jacques Lacan, psikoanalis asal Prancis, berpendapat bahwa awal pengenalan identitas diri hadir ketikaseorang mengalami apa yang disebut dengan fase cermin. Sebelum masuk ketahap tersebut, balita belum bisa mengenal pemisahan antara diri sendiri danoranglain, bayi dan ibunya, di dalam dandi luar, laki-laki dan perempuan. Fase cermin berlangsung dalam bentuk keterbelahan antara aku yang melihat dan aku yang dilihat. Di sini subjek diidentifikasikan dengan sesuatu yanglain dengan dirinya sendiri (bayangan pada cermin), dan citra subjek itu sendiri yang terbangaun karenanya bergantung pada keterasingan, pada pemindahan diri kepada yang lain. Pada tahap ini, citra diri membentuk pengenalan diri yang keliru. Subjek menemukan bayangannya yang memikat sepanjang ia menghasilkan sebuah gambar diri yang koheren, ketika

---

[45] Erich Fromm, *Man for Himself, An Inquiry Into the Philosophyof Ethics,* (ttp: tth, 1947), hlm. 43.

tubuh anak yang sesungguhnya benar-benar suatu dorongan-dorongan yang sembrawut.

Kesembrawutan pada fase cermin tersebut akan menjadi lebih teratur ketika sang subjek mulai memasuki tahap bahasa dan tahap hukum. Keterbelahan tahapan ini berbentuk aku yang berbicara dan aku yang dibicarakan. Dalam memasuki tahap bahasa kita menjadi akrab dengan karakter-karakter dalam sebuah kisah, yaitu kisah narasi dimana bahasa dengan tidak peduli terus bercerita tanpa mempedulikan aspirasi dan hasrat individu. Buat lacan, identitas diri atau subjektifitas adalah produk bahasa dan tidak ada sesuatu apa pundi luar bahasa.

BAB 4
Pola Keberagamaan Masyarakat Marginal

A. Marginalisasi sebagai Praktik Politik

Istilah marginalisasi banyak digunakan dalam disiplin ilmu komunikasi kritis. Ia menunjuk pada bentuk konsep representasi yang disalahkan atau misrepresentasi.[46] Dalam marginalisasi terjadi

[46] Misrepresentasi adalah penggambaran yang tidak sebenarnya dengan yang sesungguhnya. Tujuan representasi adalah memposisikann obyek pada situasi yag memungkinkan pihak-pihak lain memiliki penilaian yang buruk. Melalui penilaian buruk ini, obyek representasi akan mendapatkan perlakuan, respon, dan penilaian yang negatif tindakan dan sikap yang diambilnya. Praktik miskomunikasi umum berlaku di pemberitaan dengan 4 bentuk utama, yaitu ekskomunikasi, eksklusi, marginalisasi, dan

penggambaran buruk dari pihak lain. Tujuannya adalah melakukan konstruksi opini atas pihak-pihak tertentu agar mendapat penilaian yang buruk sehingga menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif. Praktik marginalisasi umum digunakan dalam pemberitaan media massa melalui penggunaan dan pilihan kata yang berkonotasi negtif terhadap obyek pemberitaan.

Dalam pengertian di atas, marginalisasi merupakan praktik politik yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu terhadap pihak lain dengan tujuan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Artinya, kelompok sasaran praktik marginalisasi sengaja ditempatkan pada sebuah posisi yang memungkinkan setiap orang atau kelompok berpikir negatif atas mereka. Melalui konstruk berpikir negatif inilah, kelompok yang dimarginalisasi terpinggir dalam praktik sosial, politik, dan budaya yang berlangsung dalam masyarakat umum.

Melalui marginalisasi ini, segala sesuatu yang berasal kelompok sasaran dianggap buruk dan berpotensi memberikan kontribusi negatif atas proses-proses sosial yang berlangsung. Dengann anggapan ini maka tindakan dan perilaku kelompok marginal dianggap tidak bermakna atau bahkan harus dihindari agar ekses-ekses negatif yang mungkin ditimbulkannya bisa diantisipasi. Bahkan perilaku yang sesungguhnya bernuansa positif bisa

---

delegitimasi. Masing-masing bertujuan sama namun dari sisi pendekatan sedikit berbeda. Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media,* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 120-125.

dianggap buruk melalui penggambaran-penggambaran yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.[47]

Selain sebagai praktik politik, marginalisasi juga bisa berlangsung dalam beberapa kondisi. *Pertama,* situasi lingkungan fisik dan sosial yang menempatkan seseoranga tau kelompok berbeda dengan komunitas umum lainnya. Keberbedaan lingkungan fisik dan sosial ini kemudian melahirkan praktik-praktik sosial, politik, dan budaya yang berbeda dengan praktik *mainstream* dalam masyarakat. Karena bersifat deferentiatif maka pelaku-pelaku praktik sosial tersebut dianggap marginal.[48]

---

[47] Contoh praktik marginalisasi adalah pemanfaatan lahan tanah timbul di Kampung Laut untuk kegiatan pertnian dan perikanan. Pemanfaatan ini sesungguhnya tidak merugikan siapapun karena berada di sepanjang aliran sungai. Namun keberadaan warga Kampung Laut yang dimarginalisasi oleh kelompok-kelompok yang berkonflik menjadikan pemanfaatan tanah timbul menjadi buruk. Kegiatan pemanfaatan lahan kemudian dibahasakan sebagai penyerobotan lahan atau perambahan liar lahan pertanian. Bahasa yang berkonotasi buruk ini kemudian memberi asumsi secara umum bagi publik bahwa warga Kampung Laut adalah kelompok pelanggar hukum. Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media,* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 126-127.

[48] Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keberbedaa sosial dengan *mainstream* adalah patologi sosial. Indikator seseorang atau kelompok dianggap patologis adalah deferentiatif dan deviatif dengan *mainstream* umum. Apabial seseorang atau kelompok bertindak, berperilaku, dan bersikap berbeda atau menyimpang dari kategori-kategori umum maka ia akan diklasifikasikan sebagai orang yang patologis atau sosiapatik. Patologi bersifat lintas kebudayaan, artinya seseoranga atau komunitas hanya akan dianggap patologis apabila ia masuk dalam konstruk budaya yang berbeda dengan situasi lokal sosialnya. Sebagai contoh, pemulung dianggap patologis apabila ia masuk dalam kebudayaan masyarakat berprofesi formal. Ia akan dianggap normal selama berada pada kelompok pemulung sebagai komunitas lokalnya. Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 11-13.

Kedua, sikap sosial yang berbeda dengan umumnya masyarakat. Secara fungsional, sikap sosial sesungguhnya dipengaruhi oleh proses interaksi yang berlangsung.[49] Apabila proses interaksi yang terjadi mengarah pada bentuk respon-respon yang berkonotasi negatif maka sikap sosial yang diambil lebih bersifat resisten. Melalui pengertian ini sikap sosial sesungguhnya bersifat konstruktif dari proses-proses sosial yang berlangsung.

Ketiga, pola perilaku yang didasarkan atas referensi-referensi reaktif atas situasi lingkungan fisik dan sosial. Kondisi ini berbeda dengan umumnya yang pola sosialnya terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman formal.[50] Prosesnya berlangsung secara transformatif sehingga tidak mengakibatkan distabilitas dalam masyarakat. Pola

---

[49] Asumsi teoretis fungsionalisme adalah bahwa tindakan sosial muncul apabila dianggap bermanfaat bagi pelakunya. Tindakan tersebut akan hilang seiring dengan nilai kemanfaatan yang berkurang. Tindakan manusia senantiasa berada dalam keseimbangan. Kemampuan untuk menstrukturkan diri bersifat alamiah dan merupakan proses dinamis. Konflik yang terjadi bersifat transisional dan akan kembali menemukan keseimbangan baru pada saat masing-masing fungsi yang ada dalam masyarakat terisi oleh individu-individu yang terdistribusi dalam fungsi-fungsi yang deferentiatif. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 131-134.

[50] Pembentukan perilaku sosial secara sosiologis berlangsung dalam 4 (empat) model, yaitu identifikasi, imitasi, sugensti, dan simpati. Masing-masing merupakan klasifikasi yang bersifat tidak linier. Individu atau kelompok memiliki watak perilaku yang didasarkan atas salah satu metode tersebut. Namun demikian, metode-metode tersebut hanya berlaku pada masyarakat yang memiliki karakter transformatif di mana pengalaman-pengalamannya didasarkan atas proses-proses yang bersifat normal. Pada masyarakat konfliktual, pola perilaku sosialnya lebih bersifat resisten. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 57-61.

perilaku yang bersifat reaktif umumnya melahirkan bentuk-bentuk resistensi yang mengarah pada sikap-sikap eksklusif atas potensi interaksi yang terjadi. Dalam pola ini, referensi reaktif bernuansa revivalis dalam arti menganggap segala hal baru yang datang berpotensi memberikan ancaman. Karena pandangan ii maka proses transformasi yang minim menimbulkan gejolak sosial sulit terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi bersifat konfliktual dan mengarah pada pembentukan tindakan-tindakan yang konfliktual.

Marginalisasi baik sebagai praktik politik yang dilakukan sengaja oleh pihak tertentu maupun berbasis situasi lingkungan fisik dan sosial berpengaruh terhadap konstruksi perilaku dan sikap individu dan kelompok sasaran. Bentuk pengaruh yang terlihat misalnya tindakan-tindakan yang berbeda dengan mainstream sebagai bagian dari ketidaksetujuan kelompok atas proses marginalisasi yang berlangsung. Namun karena kelompok marginal tidak memiliki bargaining yang cukup, proses marginalisasi terus berlangsung dan secara tidak langsung berpotensi menjadi awal pembentukan karakter. Dalam bahasa lain, sikap dan tindakan ini disebut dengan latensi atau gerakan-gerakan resistensi sosial.

B. Kondisi Sosiologis Masyarakat Marginal

Kelompok marginal atau pinggirian memiliki konstruksi sosiologis yang berbeda dengan kelompok sosial umumnya. Hal ini karena unsur pembentuk

sosiologis kelompok marginal umumnya berasal dari luar dirinya yang prosesnya berlangsung secara politis. Artinya adalah bahwa keberadaan kelompok marginal bukan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, tetapi merupakan produk sosial yang prosesnya berlangsung secara politis dan didasarkan atas relasi kuasa yang tidak berimbang.[51]

Dalam konteks perilaku sosial, teori interaksionisme simbolik mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia didasarkan atas makna yang dikandung oleh benda atau barang yang menjadi sasarannya. Makna tersebut ditentukan melalui konsensus bersama yang lalu memunculkan simbol-simbol tertentu. Melalui simbol ini individu dan kelompok saling berinteraksi satu sama lainnya. Melalui pola ini sesungguhnya setiap tindakan manusia memiliki makna tertentu dan proses produksinya melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki komunitas di mana individu berinteraksi.

Unsur pembentuk perilaku pada masyarakat marginal dimaknai secara konsensus oleh aanggota-anggota kelompoknya. Proses pemaknaan didasarkan atas

---

[51] Relasi-kuasa berpengaruh terhadap konstruksi sosiologis suatu masyarakat. Hal ini karena relasi kuasa melahirkan hubungan yang tidak seimbang antara kelompok dominan dan terdominasi. Kelompok dominan memaksakan segala sesuatu yang dimilikinya untuk dilakukan oleh kelompok terdominasi, termasuk penilaian tentang baik atau buruk. Kelompok terdominasi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menurut kelompok dominan sebagai baik. Kondisi ini yang dalam istilah Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu penaklukkan ideologis kelompok-kelompok sosial. Pierre Bourdieu, *In Other Words, Essays Towards a reflexive Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 122-124.

pandangan dunia (*world view*) kelompok yang dipengaruhi oleh situasi kognitif sebagai aspek psikologis. Situasi kognitif dikreasikan melalui aktivitas mental yang dibentuk berdasar kondisi-kondisi sosiologis sekitarnya. Kondisi sekitar bersifat politis dan alamiah yang secara kolaboratif membentuk kekhasan perilaku dan tindakan-tindakan sosialnya. Perilaku dan tindakan sosial merupakan aspek eksoteris yang bersifat empiris. Aspek ini didasarkan atas aspek mental atau kognitif yang proses pembentuknya melibatkan situasi-situasi sosiologis sekitar.

Dalam konteks masyarakat marginal, perilaku dan tindakan hanya bisa dimaknai secara menyeluruh dan total dari kesatuan aktivitas mental dan empiris. Pola pikir masyarakat marginal dipengaruhi oleh situasi-situasi psiko sosial yang memposisikannya berperilaku di luar mainstream. Perilaku ini yang sering diistilahkan dengan tidak beradab dan tidak beretika. Labelisasi ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi salah satu pembentuk karakter yang cukup berpengaruh bagi kelompok marginal.

Proses marginalisasi ini kemudian berpengaruh signifikan bagi terciptanya kondisi-kondisi sosial kelompok yang diposisikan terpinggir. *Pertama,* konfliktual.[52] Marginalisasi sebagai praktik politik

---

[52] Pemikiran filsafat modern tentang masyarakat terbelah menjadi 2 (dua) yaitu terciptanya kehidupan masyarakat berdasarkan hasil persetujuan dan konsensus umum. Aliran lain berpedirian bahwa ikatan dan tata kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan golongan

mengarah kepada pembentukan sosial yang berbeda dengan gambaran aslinya. Tujuan marginalisasi adalah memberi penggambaran yang tidak sesuai yang umumnya berkonotasi buruk atas kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Proses ini kemudian melahirkan kondisi-kondisi khas masyarakat marginal yang berasal dari kontroversi internal. Dalam tingkat lanjut, kontroversi ini kemudian memunculkan sikap-sikap curiga dan ketidakpercayaan yang dimiliki oleh masing-msing individu anggota masyarakat. Sikap penuh curiga dan *underestimate* pada tahap lanjut menjadi embrio bagi hubungan-hubungan sosial yang terpola secara konfliktual.

Masyarakat marginal terkondisikan untuk mengembangkan pola-pola interaktif yang bersifat konfliktual. Kelompok sosial yang berada di luarnya dianggap sebagai *liyan* (*the others*) yang keberadaannya memberikan potensi bagi eksistensi kelompok sosial yang dikategorikan sebagai marginal. Namun demikian, pola sosial yang konfliktual ini sesungguhnya hanya sebagai titik masuk (*entry point*) bagi proses interaksi berikutnya. Artinya bahwa pola konfliktual sebagai karakter permukaan kelompok marginal dalam hubungannya dengan interaksi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berada di luar komunitasnya. Sebagai proses

tertentu dan penundukkan terhadap golongan lain. Terminologi marginalisasi didasarakan atas aliran pemikiran sosial yang kedua bahwa ia merupakan praktik sosial – politik yang menekankan adanya dominasi kekuasaan. Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri,* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 191-194.

awal interaktif, pola konfliktual bersifat transisional yang sementara dan akan menjadi permanen saat terjadi keseimbangan melalui proses interaksi berikutnya.[53]

Kedua, resisten dan cenderung eksklusif. Penggambaran buruk dalam proses marginalisasi berkembang menjadi kebenaran umum (*common sense*) yang diakui oleh masyarakat. Secara alamiah, masyarakat akan mengidentifikasi perilaku-perilaku tertentu yang umumnya berkonotasi negatif terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran marginalisasi. Kecenderungan *common sense* ini kemudian memunculkan respon sosial dan politik dari kelompok yang dimarginalisasi melalui sikap-sikap resisten dan kecenderungan berperilaku eksklusif.

Sikap resisten kelompok marginal diarahkan untuk memberi pernyataan ketidaksetujuan atas *common sense* yang berlangsung. Artinya resistensi ini diarahkan untuk melakukan *counter* atas konstruksi, isu, dan asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh pihak tertentu yang dijadikan referensi oleh publik untuk membentuk *common sense.* Sikap resisten ini kemudian diperkuat dengan

---

[53] Teori fungsionalisme struktural memiliki asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menstrukturkan diri. Perubahan dalam masyarakat merupakan keniscayaan yang pasti terjadi sepanjang masyarakat memiliki kebutuhan yang terus berubah dan bertambah. Proses perubahan bersifat evolutif melalui penyesuaian-penyesuaian dan akan menemukan bentuk permanennya saat masing-masing anggota memerankan fungsi sosialnya secara diferentiatif. Proses transisi ini yang lazim disebut dengan konflik sosial. Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167-169.

pilihan perilaku eksklusif dalam arti meminimalisasi pengaruh-pegaruh dan eterlibatan kelompok yang dianggap *the athers* dalam proses sosial internal kelompok marginal.

Ketiga, agresif dalam memproduksi tindakan-tindakan massal yang bersifat komunal. Tindakan ini didasarkan atas kesadaran bahwa kelompok marginal adalah korban dari proses politik yang dominatif. Artinya label, karakter, dan simbol-simbol yang melekat kepada mereka bukan berasal dari produksi dan reproduksi sosial kelompok yang bersifat genuin. Sebaliknya, segala atribut yang melekat adalah pemberian dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan tertentu atas keterpinggiran kelompok sasaran marginalisasi. Melalui kesadaran ini, kelompok marginal kemudian melakukan perlawanan melalui produksi tindakan-tindakan massal-komunal yang diarahkan memberi penyeimbang atas proses politik sosial yang berlangsung. Gerakan komunal ini umumnya dieskalasi melalui perilaku-perilaku agresif dalam rangka memberikan efek sosial yang tinggi.

Tindakan agresif secara sosiologis ditemukan pada jenis-jenis yang kontroversial atau dianggap menyimpang, misalnya pendudukan, demonstrasi, atau kegiata-kegiatan yang memiliki kesan destruktif. Efek tindakan agresif ini yang kemudian dijadikan sebagai sarana bagi kelompok marginal untuk menunjukkan eksistensi kepada publik tentang praktik-praktik marginalisasi yang diarahkan kepada mereka sebagai bentuk rekayasa sosial.

Keempat, latensi. Istilah latensi sesungguhnya dihadapkan dengan konsep manifes. Latensi sering digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat yang muncul tanpa ada proses desain sebelumnya. Setiap peran memiliki 2 (dua) fungsi yang saling berpasangan, yaitu fungsi manifes dan laten. Fungsi manifes adalah manfaat atau kegunaan suatu tindakan atas peran-peran tertentu yang disandang oleh individu atau kelompok. Sementara fungsi manifes adalah manfaat atau dampak yang muncul atas peran tertentu yang tidak diharapkan tetapi keberadaannya tidak bisa ditolak.[54]

Pada masyarakat marginal, fungsi latensi menjadi simbol dan karakter tersendiri yang operasionalnya berlangsung sepanjang proses praktik politik marginalisasi terjadi. Artinya bahwa masyarakat marginal lebih cenderung memproduksi tindakan-tindakan yang berasal dari fungsi laten atas peran-peran yang dilekatkan kepada mereka. Latensi menjadi pola tindakan dan perilaku atas segala peran sosial yang dimilikinya.

---

[54] Contoh fungsi manifes dan laten adalah praktik pendidikan. Fungsi manifes dari pendidikan adalah menciptakan generasi edukatif yang memiliki kemampuan pegetahuan dan praktis yang bermanfaat bagi proses pembangunan nasional. Peserta pendidikan diharapkan menadi pioner bagi penyelenggaraan pembangunan. Namun secara bersamaan, tenaga-tenag terdidik ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum secara lebih canggih. Praktik korupsi mutakhir adalah salah satu hasil dari proses pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kemampuan korupsinya juga semakin modern. Frank J. Miflen dan Sydney C. Miflen, *Sosiologi Pendidikan,* (Bandung: Transito, 1986), hlm. 453-437.

C. Marginalisasi Masyarakat Kampung Laut

Keberadaan masyarakat Kampung Laut dimulai jauh sebelum Indonesia dideklarasikan. Tepatnya sekitar abad ke-12 pemerintahan kerajaan Mataram yang mengutus beberapa prajuritnya untuk mengamankan wilayahnya dari para bajak laut berkebangsaan Portugis.[55] Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Kampung Laut dimulai dan matapencahariaan mereka adalah nelayan tradisional dengan area tangkap utamanya di Segara Anakan.

Populasi penduduk Kampung Laut lambat laun mulai bertambah dengan terjadinya perkawinan penduduk awal dengan penduduk lokal di sekitar wilayah Nusakambangan dan Cilacap serta nelayan-nelayan baru yang bersandar dan membuat pemukiman baru di sekitar

---

[55] Menurut cerita rakyat yang sampai sekarang masih dipercaya kebenarannya oleh masyarakat setempat. Penduduk asli Kampung Laut adalah anak keturunan dari para prajurit Mataram. Para prajurit Mataram pada waktu itu datang ke daerah Kampung Laut untuk mengamankan daerah perairan Segara Anakan dari gangguan bajak laut orang Portugis. Para prajurit itu dipimpin oleh empat orang wiratamtama, yaitu Jaga Playa, Jaga Praya, Jaga Resmi dan Jaga Laut. Berkat kesaktian dari para wiratamtama itu maka perairan Cilacap dan Segara Anakan akhirnya aman, bebas dari gangguan bajak laut.Setelah keadaan aman, ternyata para wiratamtama dan anak buahnya itu tidak mau kembali ke pusat kerajaan Mataram, melainkan tetap tinggal di kawasan Cilacap dan sekitarnya. Jaga Playa dan Jaga Praya bermukim di daerah yang sekarang disebut Klapalima, sementara itu Jaga Resmi dan Jaga Laut memilih tinggal di Pulau Nusakambangan. Jaga Resmi bermukim di daerah yang kini disebut Legok Pari, sedangkan Jaga Laut bertempat tinggal di Gebang Kuning atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kembang Kuning.

Pulau Nusakambangan. Hingga saat ini, populasi penduduk Kampung Laut telah mencapai 17.062 jiwa (data BPS Kab. Cilacap tahun 2012).

Persoalan kemudian mulai muncul saat pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai "Pulau Penjara" oleh pemerintah Hindia Belanda. Pulau yang sebelumnya tidak berpenghuni kemudian kedatangan warga baru baik para tahanan maupun penjaga atau sipir dan keluarganya. Warga yang tadinya menempati tanah-tanah di Nusakambangan kemudian tergeser ke wilayah-wilayah pinggiran Nusakambangan yang saat ini dikenal dengan Kampung Laut. Konflik semakin meningkat pada saat pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Nusakambangan merupakan otoritas dari kehakiman yang diperuntukkan sebagai penjara melalui ordonasi staatblads Pemerintah Hindia Belanda Nomor 25 tanggal 10 Agustus 1912. Staatblads tersebut menetaapkan Nusakambangan sebagai Pulau Penjara yang pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) dan saat ini menjadi Menkum HAM.

Konflik *pertama* yang muncul adalah pengelola Nusakambangan merasa berhak atas segala yang ada di atas Pulau termasuk lahan-lahan pertanian yang digarap oleh warga Kampung Laut sebagai matapencahariaan. Sikap represif ala militer menjadi itimidasi tersendiri bagi warga untuk meninggalkan lahan pertanian di Pulau

Nusakambangan.[56] Konflik awal ini tidak berhenti setelah terjadi pengusiran dari Nusakambangan, tetapi justeru semakin mengalami peningkatan karena pertanian saat itu merupakan satu-satunya pilihan yang mungkin diambil selain menjadi nelayan tradisional.

Kedua, konflik semakin meningkat saat terjadi perubahan lingkungan fisik berupa pendangkalan Segara Anaka akibat sedimentasi sungai-sungai terutama dari Citanduy dan Cimeneng. Sedimentasi ini berdampak pada meningkatnya tumpukan lumpur di sepanjang aliran sungai dan laguna yang beraakibat pada menyempitnya Segara Anakan. Perubahan fisik ini memaksa warga Kampung Laut berpikir alternatif untuk mencari profesi baru di luar nelayan tradisional. Tumpukan lumpur yang disebut dengan tanah timbul kemudian dimanfaatkan oleh warga sebagai lahan pertanian dan praktik perikanan. Warga mulai beralih profesi dari nelayan tangkap tradisional menjadi petani dan nelayan budidaya. Persoalan kemudian adalah tanah timbul diklaim juga oleh Kehakiman sebagai pemegang otoritas pulau Nusakambangan. Argumentasinya adalah bahwa tanah timbul tersebut menempel pada pulau Nusakambangan sehingga hak penguasaannya berada pada kehakiman. Keberadaan warga kembali terancam oleh otoritas kehakiman.

[56] Wawancara dengan Thohari, aktivis Serikat Tani Merdeka (SETAM) Kampung Laut tanggal 10 Juni 2014.

Ketiga, keberadaan tanah timbul menjadi pusat konflik yang melibatkan institusi besar negara. Selain kehakiman dengan argumentasi bahwa tanah timbul sebagai bagian dari Nusakambangan, muncul dalam pusaran konflik adalah Pemerintah kabupaten Cilacap dan Perhutani. Masing-masing memberikan argumentasi-argumentasi yang diperkuat dengan landasan regulasi. Pemerintah Kabupaten menggunakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sementara Perhutani menggunakan PP tentang pengelolaan lahan kritis. Konflik antar institusi negara ini memposisikan warga Kampung Laut sebagai pihak yang dianggap sebagai pelanggar hukum, perambah liar, dan perusak lahan. Kegiganya menempatkan warga sebagai pihak yang salah.[57]

Konflik tiga institusi negara ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum ada titik temu dalam rangka pemecahannya. Kecenderungannya justeru dipelihara karena ada kepentinga-kepentingan tertentu atas keberlangsungan konflik. Artinya adalah bahwa konflik di Kampung Laut menjadi komoditas oleh masing-masing institusi tersebut untuk memperoleh keuntungan tertentu. Indikasinya adalah keberadaan proyek-proyek atas nama konservasi, pembinaan, penyelamatan lingkungan dan berbagai jenis proyek pengentasan kemiskinan.[58]

---

[57] Wawncara dengan Kustoro, ketua Forum warga Jaga Laut, Kampung Laut tanggal 10 Juni 2014.

[58] Proyek-proyek pemerintah baik dari APBN maupun dari penyandang dana dalam dan luar negeri di Kampung Laut sangat banyak.

Keberadaan warga Kampung Laut dalam perspektif konflik di atas menjadi komoditas yang diperebutkan. Situasi sosial warga akan terlihat lebih menarik apabila dikontruksi dalam bentuk atau profil yang deviatif atau diferentiatif dengan masyarakat umum lainnya. Dengan profil warga yang patologis inilah argumentasi-argumentasi tentang pemberdayaan, penyelamatan lingkungan, konservasi, dan penanggulangan kemiskinan diproduksi dan direproduksi. Warga menjadi komoditas yang ditransaksikan melalui proyek-proyek pembangunan.

Dalam konteks mengkonstruksi profil warga yang patologis inilah praktik marginalisasi dilakukan. Isu marginalisasi warga Kampung Laut terpola dalam 2 (dua) kerangka utama, yaitu perambah liar dan kemiskinan. Isu perambah liar menjadi komoditas oleh Kehakiman, Perhutani dan pemkab. Cilacap. Hal ini karena obyek yang dijadikan sebagai pusat pengembangan isu perambah liar adalah tanah timbul yang menjadi sumber konflik ketiga lembaga tersebut. Dengan memproduksi isu warga Kampung Laut sebagai perambah liar, masing-masing institusi yang terlibat konflik tersebut memproduksi wacana dan mengkonstruksinya sebagai argumentasi

---

Pelaksana proyek ini adalah pemerintah kabupaten, Kehakiman, dan Perhutani. Namun hingga kini, dampak dari proyek-proyek tersebut terbilang minim apabila dibandingkan dengan jumlah dan nilai proyek yang diselenggarakan. Hal yang lebih ironis adalah kultur masyarakat Kampung Laut yang berubah pada bentuk-bentuk materialisme yang segalanya diukur dengan nomial uang. Keswadayaan warga hampir hilang karena kebiasaan kegiatan menggunakan mekanisme proyek. Wawncara dengan Kustoro, ketua Forum warga Jaga Laut, Kampung Laut tanggal 10 Juni 2014.

melakukan intervensi dalam rangka melakukan inisiatif pencegahan atau pengurangan praktik-praktik perambahan liar warga.

Dalam formula pencegahan dan pengurangan ini, Kehakiman mengambil isu penegakkan hukum melalui pendektan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan dalam bentuk penertiban dan pengambilalihan lahan-lahan produktif warga. Sementara pendekatan preventif dengan bentuk kegiatan pelatihan, pertemuan warga, dan forum-forum rembuk desa.[59] Sementara Perhutani mengambil isu konservasi lingkungan. Perilaku perambahan liar yang dituduhkan kepada Warga Kampung diproduksi sebagai argumentasi Perhutani menyelenggarakan proyek konservasi lingkungan terutama penyelamatan hutan mangrove. Luas tanah timbul yang membentang sepanjang Segara Anakan merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi agenda proyek tahunan. Melalui proyek ini, Perhutani memperoleh dana yang besar dari dalam dan luar negeri.

Pemerintah Kabupaten mengambil isu pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan tanah

---

[59] Baik pendekatan represif maupun preventif sesungguhnya adalah proyek yang didasarkan atas produksi dan reproduksi isu waga Kampung Laut sebagai perambah liar. Melalui isu itu, Kehakiman memiliki argumentasi untuk menyampaikan proposal kegiatan kepada pihak-pihak tertentu yang dikemas dalam isu pendidikan dan penegakkan pada masyarakat. Praktik ini telah berlangsung lama sejak konflik tanah timbul antara lembaga-lembaga negara mulai berlangsung. Wawncara dengan Kustoro, ketua Forum warga Jaga Laut, Kampung Laut tanggal 10 Juni 2014.

timbul sebagai area baru ekonomis bagi warga Kampung Laut. Pengambilan isu pemberdayaan ekonomi ini kemudian melahirkan proyeks-proyek pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi produktif berbasis praktik budidaya dan cocok tanam. Anggaran dalam program ini cukup besar dan telah berlangsung sejak tahun 2000.[60]

Isu kedua yang dikembangkan terkait dengan keberadaan warga Kampung Laut adalah kemiskinan. Kehakiman, Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap memanfaatkan isu kemiskinan dengan usulan kegiatan pembangunan kemitraan. Pola kemitraan adalah memanfaatkan tanah timbul sebagai area usaha bersama dengan memposisikan arga sebagai penggarap. Namun demikian, program kemitraan ini sekedar wacana karena hingga kini belum ada yang terealisasi. Dugaan ini sangat memungkinkan mengingat wacana kemitraan sudah dimulai sejak tahun 2003.

Proses marginalisasi terhadap warga Kampung Laut berdasarkan narasi di atas terselenggara secara

---

[60] Alokasi untuk kegiatan ekonomi produktif dalam kerangka pemberdayaan tahun 2012 di Kampung Laut mencapai 2 M yang diakumulasi dari DAK dan APBD Kabupaten. Dana ini akan bertambah besar apabila digabung dengan dana yang dialokasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Leading sector kegiatan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas PU dan Cipta Karya, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Angka semakin fantastis kalu diakumulasi dengan dana-dana dari funding luar negeri yang juga menggunakan isu tentang pemberdayaan ekonomi yang titik masuknya adalah warga sebagai perambah liar hutan mangrove atau tanah timbul. Wawancara dengan Sabik Al Fauzi, Koordinator Sekretariat Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Kabupaten Cilacap tanggal 5 Mei 2014.

sistematis dan memanfaatkan isu konflik sumberdaya Segara Anakah dan hutan mangrove. Konflik ini sengaja dipelihara dan tidak ada *political will* dari elite-elite lembaga untuk menyelesaikannya secara tuntas sehingga memberikan kejelasan posisi warga Kampung Laut. Sikap memelihara konflik ini terjadi karena memberikan keuntungan lebih besar bagi masing-masing lembaga melalui proyek-proyek atas nama perambah liar dan kemiskinan warga.

Melalui praktik marginalisasi ini, isu tentang Kampung Laut terkesan kritis, dramatis, dan membutuhkan kecepatan waktu untuk segera ditangani. Konstruksi isu ini kemudian dipertegas dengan pembentukan opini-opini tentang masyarakat Kampung Laut sebagai komunitas yang liar, terbelakang, dan miskin. Dengan demikian maka marginalisasi Kampung Laut dilakukan secara politis untuk memberikan gambaran-gambaran yang kritis dan memerlukan penanganan ekstra. Lembaga-lembaga yang terlibat konflik semu mengidentifikasikan diri sebagai lembaga yang paling sah untuk diberi kewenangan untuk mengatasi keliaran dan kemiskinan warga Kampung Laut. Sementara itu, warga Kampung Laut sebagai obyek marginalisasi diposisikan tidak lebih sebagai partisipan atas proyek-proyek pembangunan yang berlangsung.

D. Pola Tindakan Sosial Masyarakat Kampung Laut

Dalam perspektif Weber, tindakan sosial terpola dalam 4 (empat) bentuk, yaitu tindakan rasional, tindakan tradisional, tindakan rasional berorientasi nilai, dan tindakan afektif. Pada sebuah komunitas, umumnya pola tindakan sosial berlaku salah satu dari bentuk-bentuk yang ada. Hampir tidak ditemukan masyarakat memiliki pola tindakan sosial yang ganda. Hal ini karena tindakan sosial didahului oleh proses berpikir yang secara paradigmatis tersusun dalam diktum-diktum yang bisa diterima secara ideologis.

Dengan demikian tindakan sesungguhnya merupakan manifestasi konkret dari aktivitas berpikir seseorang atas suatu obyek. Tindakan sosial memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan persepsi sosial yang terbentuk. Persepsi sendiri kontruksinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi seseorang atau kelompok baik secara fisik maupun sosial. Pada masyarakat marginal, persepsi yang muncul lebih berorientasi terhadap proses-proses yang bersifat resisten atas segala sesuatu yang hadir sebagai hal baru. Persepsi ini terkostruksi karena secara sosiologis kelompok marginal dikondisikan melalui proses-proses politis dan pengaruh lingkungan fisik yang mendominasi sepanjang kehidupan sosialnya.

Persepsi sosial sebagai basis tindakan sosial kemudian terdistribusi secara konkret melalui tindakan-tindakan sosial yang terkerangka dalam 4 (empat) pola

seperti di atas. Substansi persepsi sosial secara kualitatif akan berpengaruh terhadap pilihan pola-pola tindakan sosial yang tersedia. Persepsi sosial pada masyarakat marginal cenderung bersifat resisten dan latensi. Dua karakter sosial ini apabila dilihat dalam perspektif 4 (empat) pola dapat dikualifikasikan pada bentuk rasionalitas berorientasi nilai atau afektif. Kualifikasi ini dilakukan dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk khas dari sifat resisten dan latensi yang cenderung mengarah pada bentuk-bentuk ekspresi emosional sebagai respon yang kurang ekspektatif dari situasi sosiologis yang terjadi.

Karakter latensi masyarakat Kampung Laut terlihat dari bentuk-bentuk yang berbeda dengan kemungkinan tindakan sosial yang mungkin diambil sebagai tindakan formal dan normatif. Tindakan normal dan normatiif ini merupakan tindakan yang diharapkan dari fungsi-fungsi sosial yang bersifat manifes. Namun karena karakter sifat latensi, tindakan sosial yang muncul dan dipilih oleh masyarakat Kampung Laut berbeda dengan tindakan manifes yang diharapkan sesuai dengan perspektif mainstream.

Contoh dari tindakan yang merepresentasikann sifat latensi adalah proyeksi konservasi hutan mangrove yang tumbuh di atas lahan timbul. Konservasi ini dalam perspektif *mainstream* diorientasikan untuk memberi ruang bagi biota laut terutama ikan untuk bereproduksi. Akar hutan mangrove merupakan tempat yang paling tepat bagi ikan untuk pemijahan. Dengan hutan mangrove

makin lestari, asumsi normalnya adalah tercipta ruang-ruang yang cukup bagi ikan untuk bereproduksi dan menambah populasi. Melalui orientasi ini, tindakan sosial masyarakat Kampung Laut yang diharapkan termanifestasikan adalah berpartisipasi dalam proses konservasi hutan mangrove. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat Kampung Laut memanfaatkan hutan mangrove sebagai tambak-tambak ikan untuk kegiatan budidaya perikanan.[61] Bentuk lain pemanfaatan hutan mangrove adalah pembuatan jalur (*track*) penelusuran hutan mangrove untuk kegiatan eko wisata. Pilihan tindakan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa fungsi yang diambil adalah berbeda bahkan bertolak belakang (laten) dengan fungsi manifes yang diharapkan.

Tindakan latensi ini berpola rasionalitas berorientasi nilai. Konservasi hutan mangrove bagi masyarakat Kampung Laut dianggap tidak ada manfaatnya karena pada saatnya akan hialng dengan sendirinya. Kampung Laut menjadi daratan menjadi keniscayaan yang hampir pasti akan terjadi. Maka mempersiapkan untuk memiliki profesi lain di luar sebagai nelayan tradisional tangkap adalah hal yang harus segera dipersiapkan.

---

[61] Masyarakat Kampung Laut memiliki keyakinan bahwa kampung mereka akan segera berubah menjadi daratan. Maka upaya penyelamatan atau konservasi hutan mangrove akan menjadi sia-sia apabila penanganan sedimentasi tidak dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Proyek konservasi hanya menjadi komoditas kelompok tertentu yang tidak didesain khusus untuk memberi solusi atas persoalan warga Kampung Laut. Karean desain bukan untuk warga, maka tidak ada alasan bagi warga Kampung Laut untuk berpartisipasi di dalamnya. Wawancara dengan Kustoro, Ketua Forum warga Jaga Laut tanggal 10 Juni 2014.

Memanfaatkan hutan mangrove atau tanah timbul untuk kegiatan budidaya perikanan dan penelusuran jalur sebagai bagian dari eko wisata lebih bernilai ketimbang konservasi penyelamatannya. Dengan demikian, tindakan latensi yang dianggap destruktif dalam perspektif *mainstream* memiliki rasionalitas yang didasarkan atas nilai-nilai atau manfaat yang dianggap benarr oleh komunitas.

Karakter latensi di atas juga dapat dianalisis sebagai tindakan afektif yang merupakan salah satu dari indikasi tindakan kelompok marginal. Dalam perspektif ini, pilihan tindakan yang berbeda dengan ekspektasi manifes merupakan tindakan irrasional. Artinya pilihan tindakan masyarakat Kampung Laut membuat tambak perikanan dan jalur eko wisata tidak rasional karena diangga tidak memberika kontribusi bagi peningkatan kapasitas hidup komunitas. Perspektif tindakan afektif menunjukkan bahwa tindakan seseorang atau komunitas didasarkan atas perasaan atau emosi tanpa memperhitungkan akal budi. Emosi yang terbangun pada masyarakat marginal adalah terpinggir, dianggap sebagai orang lain (*the athers*), dan berbagai karakter negatif lainnya.

Atas dasar konstruksi emosional ini maka pada saat terjadi mobilisasi tindakan *mainstream*, masyarakat Kampung Laut sebagai komunitas marginal memilih tindakan-tindakan sosial yang diarahkan dalam rangka membangun solidaritas dan mempertahankan eksistensi kelompok. Tindakan yang berbeda ini tidak akan

dilakukan oleh komunitas lain karena berlawanan dengan kekuatan institusi negara yang besar. Namun karena berorientasi afeksi, tindakan berbeda ini diambil dengan keyakinan tertentu yang hanya dimiliki oleh komunitas masyarakat Kampung Laut. Eksistensi dan solidaritas masyarakat dianggap lebih penting dari segalanya sehingga tindakan-tindakan yang secara formal menguntungkan ditinggal dan memilih tindakan yang dianggap sia-sia atau bahkan konyol oleh perspektif normalisme.

Karakter resisten tindakan sosial masyarakat Kampung Laut dapat dilihat dari sertifikasi hak milik. Dalam perspektif hukum positif, obyek hukum yang dapat disertifikasi terbatas pada tanah atau bangunan. Sementara, perairan tidak menjadi hak privat dan menjadi otoritas institusi tertentu dari struktur pemerintahan. Sementara itu, dalam hukum adat yang diberlakukan di Kampung Laut, perairan khususnya yang berada di wilayah Segara Anakan menjadi hak privat yang bisa diwariskan kepada keturunannya. Termasuk apabila perairan tersebut akan berubah menjadi tanah atau daratan sebagai akibat dari sedimentasi.[62] Dengan

[62] Perairan bagi warga Kampung Laut layaknya sawah bagi masyarakat darat. Ia menjadi sumber nafkah dan menjadi jaminan matapencahariaan bagi keluarga. Konsep sertifikasi yang diajukan adalah hanya mengkover tanah dan bangunan tempat tinggal. Sementara, area ekonomi bermata pencahariaan tidak masuk dalam skema ini. Sertifikasi akan menghilangkan banyak aset warga dan ini dianggap sebagai bagian dari proyek perampasan aset. Pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian menjadi alasan utama warga menolak gerakan sertifikasi hak

pendekatan formalistik hukum positif, gerakan sertifikasi lahan di Kampung Laut ditolak warga.

Pilihan tindakan ini dalam perspektif tindakan sosial dikategorikan rasional yang berorientasi nilai. Manfaat menolak sertifikasi yang tidak berbiaya dari pemerintah dianggap lebih bermanfaat ketimbang menerimanya. Pilihan ini sulit dipahami apabila menggunakan logika formal di mana proses sertifikasi pada umumnya berbiaya tinggi dan membutuhkan proses yang tidak sederhana. Pemeberian fasilitas sertifikasi aset privat menjadi solusi dan akan dianggap tidak rasional apabila respon yang muncul adalah penolakan.

Namun rasionalitas yang dibangun masyarakat Kampung Laut adalah nilai guna atau manfaat dari sertifikasi ini lebih rendah ketimbang penolakannya. Dengan melakukan penolakan, masyarakat Kampung Laut tidak kehilangan aset-asetnya terutama perairan sebagai sumber dan area utama kegiatan ekonominya. Di sisi lain, sertifikasi atas tanah dan bangunan bisa dilakukan secara mandiri yang biayanya relatif lebih kecil apabila diperbandingkan dengan aset perairan yang tidak terkover oleh hukum positif.

Secara afektif, tindakan penolakan serifikasi aset ini memberi dampak terhadap penguatan solidaritas kelompok terutama untuk meningkatkan daya tawar terhadap institusi di luarnya. Hukum adat yang telah

milik. Wawancara dengan Thohari, aktivis SETAM Kampung Laut tanggal 10 Juni 2014.

berlangsung turun-temurun tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh konstruk hukum positif. Oleh karena itu, penolakan sebagai tindakan resistensi diarahkan sebagai modal politik komunitas untuk proses advokasi menyeluruh atas hak-hak sosialnya termasuk hak ekonomi area tangkap ikan Segara Anakan.

E. Keberagamaan sebagai Tindakan Sosial Masyarakat Kampung Laut

Karakter resisten dan laten dalam tindakan-tindakan sosial masyarakat Kampung Laut tercermin secara kolektif sebagai bagian dari identitas khas yang membedakan dengan komunitas lain. Dua karakter utama ini terepresentasi hampir pada semua tindakan-tindakan sosial terutama yang bersifat kolektif dan massal. Proses kolektivitas tindakan sosial terbetuk baik secara sengaja melalui mobilisasi maupun kesadaran komunal yang tersusun dari faktor-faktor pembentuknya. Dalam perspektif teori fungsionalisme, tindakan sosial merupakan respon atas stimulasi-stimulasi yang ada sehingga membentuk perilaku baru. Perilaku ini sekaligus juga akan berfungsi bagi stimulann baru yang secara beruntun akan menimbulkan respon-respon baru.[63] Begitu seterusnya sehingga proses sosial dalam masyarakat terus berlangsung dan membentuk perilaku yang dinamis.

---

[63] Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern, dari Parsons sampai Habermas,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 71-73.

Selain contoh tindakan yang muncul secara kolektif akibat dorongan-dorongan fisik dan sosial seperti penolakan konservasi hutan mangrove dan penolakan sertifikasi hak-hak privat, tindakan massal yang didasarkan atas kesadaran komunal adalah tindakan keagamaan. Tidak seperti umumnya, tindakan keagamaan masyarakat Kampung Laut memiliki orientasi yang agak berbeda karena didasarkan atas pandangan-pandangan keagamaan yang khas dari komunitas pinggiran dan nelayan tradisional.[64] Konstruksi keagamaan masyarakat nelayan tradisional umumnya bersifat sinkretis, yaitu mencampur ajaran-ajaran agama baik berupa syari'at maupun akidah dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional. Sinkretisme merupakan wujud spiritualitas agama nelayan yang memadukan konsep keberagamaan dengan konsep pandangan hidup komunalnya.

Pada masyarakat Kampung Laut, praktik keagamaan yang bisa dilihat dari unsur-unsur eksoterisme seperti peribadatan memiliki orientasi sebagaimana dimiliki dalam tindakan sosial lainnya. Artinya karakter resisten dan laten juga dapat ditemui dalam praktik-

---

[64] Orientasi umum setiap tindakan sosial masyarakat nelayan adalah bertahan hidup dan bekerja. Setiap saat, keluarga nelayan mengalami rasa teracam dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Tindakan sosial yang dilakukan termasuk agama sesungguhnya didasarkan untuk menciptakan rasa aman dari keterancaman tersebut. Agama menjadi lebih spesial karena masyarakat meiliki padangan yang tidak hanya profan seperti sandang, pangan, dan papan tetapi juuga punya pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Proyeksi keagamaan ini yang lalu menjadi dasar nelayan untuk mendapatkan keamanan dalam hidup. Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebuta Sumberdaya Perikanan,* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 12-13.

praktik keagamaan masyarakat. Kondisi ini berbbeda dengan praktik keagamaan pada masyarakat lainnya yang umumnya diorientasikan sebagai bentuk transendensi atas realitas-realitas empirik yang dilaluinya.

Aspek eksoteris dalam bentuk misalnya praktik peribadatan tidak lepas dari apsek-apsek esotersis yang melingkupinya. Aspek eksoteris merupakan ekspresi keberagamaan yang tampak empirik dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Ia muncul dalam bentuk-bentuk konkret tindakan yang memiliki relevansi dengan agama tertentu misalnya shalat atau ke gereja. Sementara aspek esoteris merupakan religiusitas yang didasarkan atas keyakinan tentang keberadaan yang transendental.[65]

Tindakan keagamaan sebagai aspek eksoteris tidak terlepas dari konstruksi mental sebagai aspek esoterisnya. Religiusitas atau spiritualitas merupakan konstruksi pikir keagamaan yang prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam konteks inilah karakter khas masyarakat Kampung Laut yang resisten dan laten cukup mengintervensi formulasi pikir yang dilakukan. Esotersime dari perilaku keberagamaan kemudian termanifestasikan dalam 2 (dua) konsep utama keagamaannya, yaitu keselamatan dan kesejahteraan.[66]

---

[65] Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas ?,* Cet – IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 12-13.

[66] Masyarakat Kampung Laut menggambarkan kehidupan dunia dan akhirat menggunakan istilah "waras – slamet". Istilah ini menunjuk pada beberapa konsep tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan akhirat akan selamat (slamet) apabila ia memiliki kehidupan dunia yang sejahtera

Konsep “waras – slamet” merupakan dua idiom yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang akan sejahtera (waras) apabila ia bisa melakukan atau menjalani kehidupan secara selamat (slamet). Situasi yang tidak sesuai dengan idealitas sosial karena proses konflik yang panjang membutuhkan kontekstualisasi konsep “waras – slamet” dalam realitas yang faktual. Kontekstualisasi “waras – slamet” dalam situasi konfliktual berbeda dengan situasi normal. Dengan ini maka pilihan-pilihan tindakan yang berkarakter resisten dan laten memiliki rasionalitas yang berorientasi nilai bagi perwujudan “sejahtera” dan “selamat” dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kontekstualisasi konsep “waras – slamet” inilah yang mendasari tindakan-tindakan keagamaan masyarakat Kampung Laut. Melalui pemaknaan yang berbeda dengan *mainstream* ini, praktik-praktik keberagamaan yang muncul terkesan berbeda dan menyimpang dengan praktik keagmaan masyarakat umumnya. Contoh sederhana misalnya dilihat dari cara berpikir tentang rizki. Baik yang beragama Islam maupun lainnya tidak memiliki perbedaan mendasar. Bagi masyarakat Kampung Laut, rizki diberikan Tuhan kepada mereka dalam bentuk lahan ekonomi (perairan dan

(waras). Idealnya, dua proyeksi kehidupan tersebut ditempuh dengan cara-cara yang normal, namun situasi sosiologis masyarakat Kampung Laut yang konfliktual, maka perlu kontekstualisasi keidupan normal. Sejahtera (waras) akan dicapai apabila proses kehidupan empirik ditempuh dengan selamat (slamet). Sebagai proyeksi atau kehidupan, ia bisa ditempuh dengan berbagai cara yang sepanjang berorientasi kepada kemaslahatan dibenarkan oleh tradisi komunitas. Wawancara dengan Darmono, ketua Adat Kampung Laut tanggal 5 Juni 2014.

daratan). Karena perairan dan daratan dikalim oleh orag lain, maka merebut baik secara persuasif maupun konflik dipahami sebagai bagian dari keniscayaan atau *sunnatullah* yang oleh karenanya bernilai ibadah.

Konsep “waras – slamet” sesungguhnya lazim berlaku pada padangan masyarakat Jawa terhadap agama. Melalui pandangan koseptual ini, agama menjadi media bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan substantif baik kehidupan dunia maupun akhirat. Secara normal, konsep “waras – slamet” akan menjadi pembimbing bagi masyarakat agama dalam menjalani kehidupannya. Kontekstualisasi konsep ini pada masyarakat jawa kemudian diturunkan pada bentuk-betuk yang lebih operasioal misalnya *sabar* atau *nrima* (menerima secara ikhlas). Konsekuensi dari perilaku berbasis konsep ini adalah tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan santun seperti kooperatif dan patuh.

Tindakan santun di atas secara eksplisit tidak ditemukan dalam pola keagamaan pada masyarakat kampung Laut. Hal yang terjadi justeru sebaliknya, tindakan-tindakan keagamaann yang muncul mengesankan pada bentuk-bentuk yang kontraproduktif dengan fungsi agama itu sendiri. Secara fungsional, fungsi agama adalah menciptakan struktur sosial yang lebih beradab melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai

transendental. Melalui nilai inilah manusia dalam agama apapun akan mengalami titik temu.[67]

Bentuk-bentuk yang terkesan kontraproduktif dari tindkan keagamaan masyarakat Kampung Laut tidak lepas dari pengaruh karakter khas komunitas yang bersifat resisten dan laten. Artinya bahwa agama sebagai tindakan sosial yang bersifat massal dan komunal menjadi media sekaligus amunisi bagi masyarakat untuk mewujudkan tujuan-tujuan komunitas terlepas dari proses marginalisasi. Dengan demikian maka agama sesungguhnya difungsikan secara politis untuk melawan gerakan-gerakan marginalisasi dari kelompok dan institusi lain di luar komunitas. Implikasi lebih lanjut dari proses politis atas agama ini adalah formulasi aspek-aspek keagamaan terutama yang bersifat eksoteris terkonstruk dalam wujud yang berbeda dengan *mainstream*. Wujud ini apabila dilihat secara normatif akan terjustifikasai sebagai bentuk penyimpangan agama karena berbeda dengan umumnya. Namun karena karakte khas resisten dan laten,

---

[67] Kemunculan agama secara sosiologis memiliki pola yang sama. Agama dimunculkan saat manusia mengalami keterbatasan secara teknologis dan pengetahuan di mana keduanya diandalkan untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Namun pada titik tertentu, pengetahuan dan teknologi mengalami keterbatasan sehingga manusia mencari kekuatan lain di luar keduanya. Dari proses inilah kemudian agama muncul. Metode yang ditawarkan oleh agama adalah transendensi, yaitu pola pikir yang mengatasi empirisisme. Metode solutif agama tidak faktual sebagaimana pengetahuan dan teknologi tetapi abstrak. Nilai abstrak inilah yang lalu menjadi dasara bagi produksi dan reproduksi yang berorientasi pada penguatan moral dan spiritual. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 26-28.

wujud yang terkesan di luar *mainstream* memiliki makna yang berbeda.

2 (dua) bentuk aspek peribadatan yang berbeda dengan *mainstream* adalah anjing sebagai hewan ternak dan peringatan hari besar Islam terutama *nisfu sya'ban* (*nyadran*). Keduanya berbeda dengan *mainstream* eksoterisme Islam pada umumnya.[68] Dalam pandangan masyarakat Kampung Laut, keduanya dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok marginal yang memiliki tindakan-tindakan berorientasi latensi dan resistensi komunitas.

Selain 2 (dua) hal di atas, hubungan antar agama masyarakat Kampung Laut relatif cair. Artinya hubungan beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Laut berlangsung dalam situasi sosial yang intim yang hampir tidak bisa dibedakan secara fisik antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain. Hal ini ditambah dengan keberadaan rumah ibadah terutama masjid dan gereja yang tidak memiliki jarak secara demarkatif. Bahkan, praktik peribadatan yang berlangsung di masjid dan gereja bisa berlangsung secara

---

[68] Secara normatif, anjing adalah hewan yang dikategorikan sebagai najis *mugaladzah.* Karenanya banyak umat Islam menghindari memelihara anjing sebagai hewan ternak. Sementara nyadran umumnya digunakan oleh mmasyarakat Islam sebagai media untuk membangun silaturrahim dengan keluarga melalui ziarah kubur kepada keluarga yang telah meninggal. Bagi warga Kampung Laut, nyadran digunakan untuk berhubungan langsung dengan "penguasa" pantai selatan sebagai penyedia rezeki di lautan. Prosesi ini dilakukan dengan upacara besar melalui tindakan-tidakan keagamaan yang sinkretis.

bersamaan. Ketiadaan pembeda yang demarkatif antara kedunya menjadikan hubungan keagamaan antara Islam dan Nasrani berlangsung sangat cair dan tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil.

Hubungan yang intim ini berdampak pada situasi-situasi peribadatan lain misalnya idul fitri atau natal. 2 (dua) hari raya berbeda tersebut dirayakan secara bersama baik oleh penganut Islam maupun Nasrani. Pada bulan ramadhan dan idul fitri, perayaan tidak hanya eksklusif milik warga yang beragama Islam tetapi juga dirayakan oleh warga yang beragama Nasrani. Begitu halnya saat Natal, warga yang beraga Islam berpartisipasi dalam proses perayaannya.

Pola ini terjadi karena kohesifitas komunitas masyarakat Kampung Laut dianggap lebih penting untuk menunjukkan eksistensinya dalam situasi yang serba konfliktual. Agama menjadi pilihan untuk menunjukkan keberbedaan dengan perilakua agama *mainstream* karena sifatnya yang transendental, termobilisasi secara spiritual dan memiliki daya ikat kuat dalam masyarakat. Pola tindakan keagamaan yang berbeda menjadi tindakan sosial bagi masyarakat Kampung Laut untuk menunjukkan resistensi dan latensinya terhadap praktik-praktik sosial-politik kelompok atau institusi di luarya yang berorientasi untuk memposisikannya pada posisi marginal.

Dengan demikian maka praktik keagamaan masyarakat Kampung Laut yang terlihat berbeda dengan *mainstream* bukanlah sebagai bentuk penyimpangan atas

ajaran-ajaran keagamaan. Tindakan keagamaan tersebut merupakan bentuk dari pola tindakan sosial yang berorientasi secara sosiologis melawan dan mempertahankan eksistensinya sebagai kesatuan sosial utuh.

BAB 5
Penutup

Tindakan merupakan ekspresi verbal yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang diarahkan pada individu atau kelompok lain. Karena diarahkan kepada manusia, setiap tindakan bersifat sosial dalam arti berimplikasi terhadap tindakan lainnya sebagai respon. Tindakan respon ini sekaligus menjadi stimulan yang akan memunculkan tindakan baru.

Sebagai ekspresi verbal yang bersifat faktual, tindakan sosial tidak berlangsung tiba-tiba sebagai kejadian yang terberi (*given*) atau ahistoris melainkan

menyejarah (historis) dan didahului oleh proses-proses sosial sebelumnya. Proses yang mendahului tindakan sosial didominasi oleh aktivitas mental yang mengkonstruksi pengetahuan secara paradigmatis. Melalui proses konstruksi pengetahuan inilah seseorang atau kelompok mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Sifat paradigmatis menjadi pembeda sekaligus karakter pola pikir yang unik dari seorang individu atau kelompok. 2 (dua) hal yang mendominasi pandangan-padangan paradigmatis atas suatu obyek pengetahuan adalah kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis yang menjadi mileu bagi individu atau kelompok.

Pengaruh kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis dalam proses konstruksi pengetahuan terjadi karena konsep mileu sebagai kesatuan kohesif antara manusia dan lingkungan berlangsung secara interaktif dan terus-menerus. Perubahan pada lingkungan fisik dan situasi sosiologis memberikan dampak secara langsung bagi dinamika individu dan kelompok yang saling berinteraksi. Namun demikian, tingkat keterpengaruhan konstruksi pengetahuan individu dan kelompok oleh lingkungan fisik dan situasi sosiologis terkerangka dalam pandangan-padangan paradigmatis yang bersifat ideologis. Pandangan paradigmatis ini berakar pada realitas sosio historis yang pembentukannya melalui proses politik yang panjang. Sebagai proses politik, pembentukan realitas sosio historis berorientasi memberikan keuntungan-keuntungan tertentu yang

berimplikasi pada pilihan metode pragmatis seperti rekayasa, manipulasi, dan konspiratif.

Kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis masyarakat Kampung Laut saat ini berada pada situasi transisional dan konflik. Lingkungan fisik transisional karena diyakini Kampung Laut akan segera menjadi daratan akibat tingkat sedimentasi Segara Anakan yang tidak terkendali. Berbagai proyek yang mengatasnamakan konservasi dan penyelamatan lingkungan Kampung Laut lebih berorientasi proyek karena prosesnya parsial. Berbagai proyek yang telah berlangsung lama tidak berpengaruh signifikan bagi pengendalian sedimentasi. Bagi warga Kampung Laut, Segara Anakan dan hutan mangrove adalah komoditas bagi pihak-pihak tertentu untuk terus beraktivitas atas nama konservasi.

Kondisi fisik lingkungan yang dijadikan komoditas ini diperparah dengan konflik antarlembaga pemerintah yag berebut klaim kepemilikan atas tanah timbul hasil sedimentasi. Klaim kepemilikan ini lebih bertumpu pada persoalan siapa yang paling syah mengelola lahan tanah timbul. Sementara itu, warga Kampung Laut sebagai pemangku utama lingkungan tidak dilibatkan bahkan dalam banyak hal dijadikan sebagai sumber isu yang memperkuat klaim lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat konflik.

Untuk kepentingan memperkuat argumentasi atas klaim kepemilikan atas pengelolaan tanah timbul, warga Kampung Laut dijadikan obyek pembentukan opini

melalui proses marginalisasi. Melalui proses ini, masyarakat Kampung Laut diposisikan sebagai kelompok perambah liar dan perusak ekosistem. Marginalisasi sebagai praktik politik ini lalu membentuk karakter khas masyarakat terhadap segala bentuk tindakan-tindakan yang diarahkan kepada mereka. Resisten dan latensi merupakan 2 (dua) karakter khas masyarakat Kampung Laut yang terrepresentasi dalam tindakan-tindakan sosial mereka termasuk dalam hal perilaku keberagamaan.

Perilaku keberagamaan terekspresi dari pandangan keagamaan yang konstruksinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis. Bagi masyarakat Kampung Laut, kondisi fisik dan situasi sosiologis yang berbeda dengan idealitas mereka melahirkan karakter resisten dan laten. Karakter ini berpengaruh terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berproyeksi sebagai alat untuk melakukan perlawanan dan memunculkan fungsi-fungsi latensi dari agama.

Bagi masyarakat Kampung Laut, agama dipahami sebagai instrumen untuk keluar dari persoalan-persoalan faktual yang *pertama* keterancaman lingkungan fisik yang memberi potensi kehilangan profesi dan matapencahariaan. Persoalan faktual *kedua* marginalisasi komunitas oleh lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat konflik kepemilikan atas tanah timbul di sepanjang Segara Anakan. Agama diyakini memiliki kemampuan solutif atas persoalan-persoalan faktual melalui metode transendensi.

Keyakinan ini kemudian mendorong masyarakat memproduksi upacara-upara ritual yang bersifat massal yang diarahkan untuk membantu masyarakat menemukan solusi atas persoalan-persoalan faktual yang dihadapi. Namun karena karakter resisten dan laten, praktik ritual keagamaan ini dikonstruk berbeda dengan *mainstream.* Konteks ini ditujukan untuk memberi penggambaran kepada pihak-pihak di luar komunitas bahwa masyarakat Kampung Laut memiliki eksistensi yang mandiri dan berbeda dengan opini masyarakat pada umumnya. Ritual keagamaan yang bersifat massal digunakan sebagai instrumen penyamapai informasi kepada publik terkait eksistensi yang diperjuangkan.

Dengan demikian, praktik ritual keagamaan yang terkesan menyimpang sesungguhnya menjadi bagian dari perjuangan eksistensial masyarakat Kampung Laut yang mengalami marginalisasi secara politis oleh lembaga-lembaga yang terlibat konflik kepemilikan tanah timbul. Kesan menyimpang dikreasikan untuk tujuan memperoleh manfaat tertetu. Manfaat ini dianggap lebih besar ketimbang apabila masyarakat melakukan praktik ritual yang sama dengan keagamaan *mainstream.* Praktik ritual yang terkesan menyimpang ini didesain secara politis untuk memperkuat eksistensi di tengah-tengah proses marginalisasi sosial.

Daftar Pustaka

Abu Ahmadi, *Psikologi sosial,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial, Integrasi Pengetahuan wahyu dan Pengetahuan Empirik,* Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Ahmad Muttaqin, *Alih Profesi Masyarakat Kampung Laut,* makalah disampaikan pada Jambore Nasional Forum Warga di Makassar tahun 2008.

Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas ?,* Cet – IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Audifax, *Semiotika Tuhan, Tafsir atas Pembacaan Manusia terhadap Tuhan,* Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.

Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama,* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* Bandung: Rosdakarya, 2000.

Daniel L. Pals, *Seven Teories of Religion,* New York: Oxford University Press, 1996.

David Lee dan Howard Newby, *The Problem of Sociology,* London: Hutchinson & Co. Publisher Ltd, 1984.

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Alih Bahasa MZ. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1988.

Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Erich Fromm, *Man for Himself, An Inquiry Into the Philosophyof Ethics,* ttp: tth, 1947.

Erik H. Erikson, *Identity, Youth and Crisis,* New York: W. W. Norton Company, 1968.

Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media,* Yogyakarta: LkiS, 2009.

Frank J. Miflen dan Sydney C. Miflen, *Sosiologi Pendidikan,* Bandung: Transito, 1986.

George Ritzer, *Sosiology, A Multiple Paradigm Science,* London: Allyn and Bacon Inc, 1980.

Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern, dari Parsons sampai Habermas,* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebuta Sumberdaya Perikanan,* Yogyakarta: LkiS, 2002.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitia Kualitatif,* Bandung: Rosdakarya, 1989.

MB Miler dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods,* Beverly Hills: Sage, 1992.

Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Pierre Bourdieu, *In Other Words, Essays Towards a reflexive Sociology*, Cambridge: Polity Press, 1990.

Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM Yogyakarta, *Keanekaragaman Hayati Segara Anakan,* Laporan Penelitian tahun 2001-2001.

Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri,* Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Buku 1 edisi ke-3, Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Sheldon Stryker, *Symbolic Interactionism, A Structural Version,* California: Benjamin Cummings, 1980.

SJ Taylor dan R Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods, The Search Meanings,* Second Edition, Toronto: John Miley and Sons, 1984.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

SP. Turner, *The Cambridge Companion to Weber,* New York: Cambridge University, 2000.

Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal,* Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Biografi Penulis



Nama Lengkapnya Ahmad Muttaqin, dalam kesehariannya dipanggil Aken, ia lahir di Cilacap, 15 Nopembver 1979. Menamatkan sekolah dasar dan menengah pertama di tempat kelahirannya kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah sambil nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Setamat dari Tebuireng, tahun 1997 melanjutkan studi S-1 pada Jurusan Perbandingan Madzhad dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta. Tahun 2002 hingga 2004 mengambil S-2 Sosiologi di UGM Yogyakarta.

Beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan adalah sebagai Peneliti di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU di Cilacap dan menjadi fasilitator program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat kerjasama dengan lembaga-lembaga donor seperti The Asia Foundation, Ford Foundation, dan Partnership.

Sejak tahun 2008, ia menjadi Pengajar di IAIN Purwokerto dengan spesialisasi Sosiologi Agama. Selain mengajar, ia juga masih aktif di Lakpesdam NU Cilacap dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah. Beberapa penelitian dalam bidang sosiologi agama

dan isu-isu demokratisasi dan transparansi dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah nasional.

Ia bertempat tinggal di Perumahan Pasir Luhur Permai No. 475 B Pasir Kidul Purwokerto. Beristeri Nurul Aini Mustarofah, Ia dikaruniani 3 (tiga) orang anak Aifa Zahda Aulia Ahmad (putri, 12 tahun), Tsabit Fawwaz Ahmad (putra, 8 tahun), dan Reisa Aunalla Ahmad (putri, 6 tahun).


NU
نهضة العلماء
1926


UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI


N U
LAKPESDAM